

SKRIPSI
PENERAPAN PSAK 23 TENTANG PENDAPATAN KARYAWAN
DI PUSKESMAS PALAKKA KABUPATEN BARRU
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)



OLEH:

YUSRIANDI
NIM: 18.62202.052

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

**PENERAPAN PSAK 23 TENTANG PENDAPATAN KARYAWAN
DI PUSKESMAS PALAKKA KAB.B BARRU.
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**YUSRIANDI
NIM: 18.62202.052**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
(S. Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan PSAK No. 23 tentang Pendapatan Karyawan Di Puskesmas Palakka Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Yusriandi


NIM : 18.62202.052

Program Studi : Akuntansi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.4327/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. 

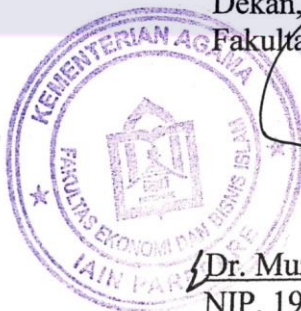
NIP : 19610320 199403 1 004


Pembimbing Pendamping : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M 

NIP : 19711111 199803 2 003

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan PSAK No. 23 tentang Pendapatan Karyawan Di Puskesmas Palakka Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Yusriandi

Nomor Induk Mahasiswa : 18.62202.052


Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.4327/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

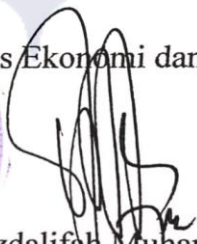
Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd	(Ketua)	
Dr. Syahriyah Semaun, S.E.,M.M	(Sekretaris)	
Dra. Rukiah, M.H.	(Anggota)	
Abdul Hamid, S.E.,M.M	(Anggota)	

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun. M.Ag.
NIP. 19710208200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sebagai rasa syukur dan bahagia yang tidak ada hentinya penulis mengucapkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada Ibu saya tercinta Heriawati dan Ayah saya tercinta Mastang yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, dan doanya, dan teruntuk kakek dan nenek saya yang selalu mendukung dan mendoakan dan membantu kebutuhan kuliah saya. Berkat merekalah sehingga penulis selalu semangat dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Bapak Moh. Yasin. Soumena.M,Pd. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E.,M.M selaku pembimbing pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis dengan kerendahan hati juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag.sebagai Rektor IAIN Parepare yang baru dan Bapak Prof. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare pada periode 2018-2022 yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang baru dan Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan FEBI pada periode 2018-2022 atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Abdul Hamid. S.E.,M.M. dan Ibu Dra. Rukiah, M.H selaku penguji.
4. Ibu An Ras Try Astuti, M.E. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dan nasihat.
5. Ibu Andi Ayu Frihatni sebagai Ketua program studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
6. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan tenaga, waktu dan pikiran untuk mendidik penulis dengan versi tersendiri.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Bapak, Ibu dan Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu penulis.
9. Bapak Takbir Jafar. SKM.S.kep selaku Kepala Puskesmas Palakka dan seluruh karyawan di Puskesmas Palakka yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian.

10. Kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis.
11. Kepada seluruh Teman-teman yang ada di kampus, prodi akuntansi syariah dan teman teman seperjuangan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 23 Januari 2023 M
1 Rajab 1444 H

Penulis,



Yusriandi
NIM. 18.62202.052

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yusriandi

NIM : 18.62202.052

Tempat/Tgl. Lahir : Barang, 03 Juni 1999

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Penerapan PSAK 23 tentang pendapatan karyawan di Puskesmas Palakka kab. Barru. (Analisis Akuntansi Syariah).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Januari 2023 M
1 Rajab 1444 H

Penulis,



Yusriandi
NIM. 18.62202.052

ABSTRAK

Yusriandi. *Penerapan PSAK 23 tentang Pendapatan karyawan di Puskesmas Palakka Kab. Barru. (Analisis Akuntansi Syariah)*. Dibimbing oleh Bapak Moh. Yasin. Soumena Selaku pembimbing utama dan Ibunda Syahriyah Semaun, Selaku pendamping pembimbing.

Saat ini telah banyak perhatian khusus terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh Puskesmas Palakka. Salah satunya didalamnya yang berkaitan dengan Praktik akuntansi adalah pelayanan jasanya maka diperlukan prinsi akuntansi syariah. Puskesmas Palakka adalah suatu organisasi pelayanan mandiri tang bertanggungjawab pada wilayah kerjanya. Salah satunya didalamnya yaitu PSAK No. 23 yang membahas pendapatan.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Dan memiliki sumber data Primer dan Skunder.

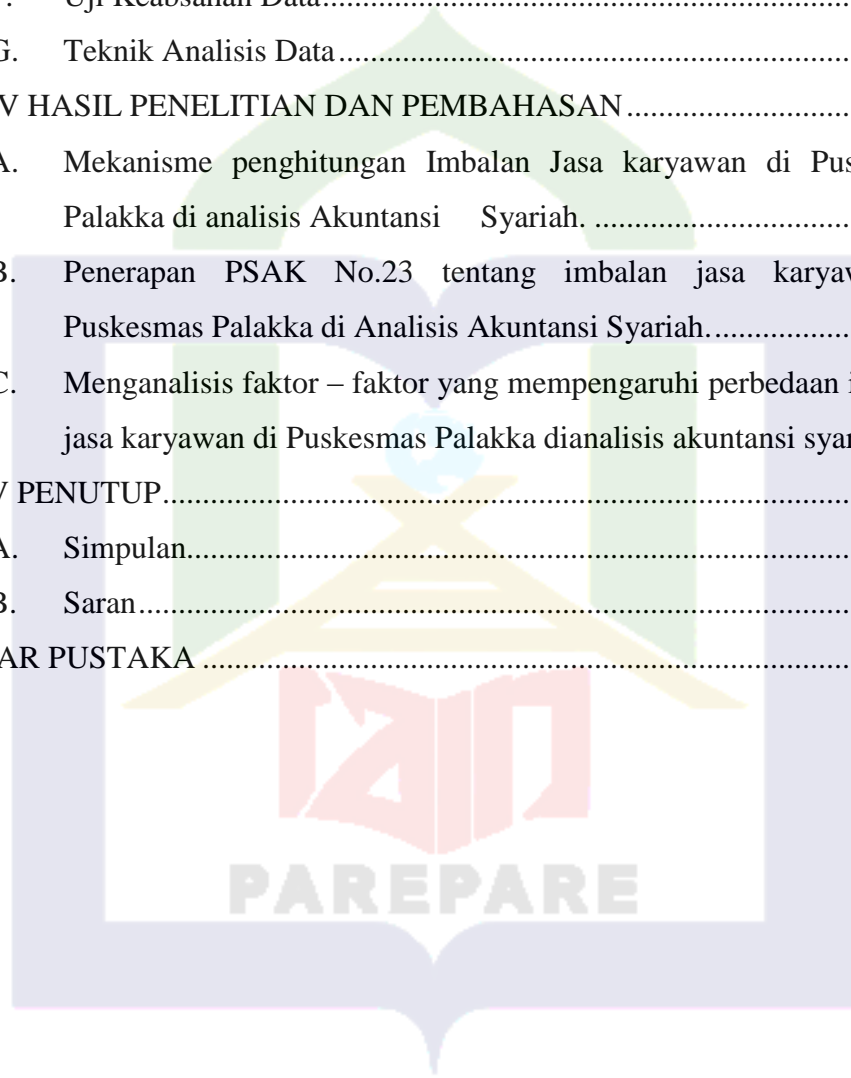
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1)Mekanisme penghitungan imbalan jasa di Puskesmas Palakka memiliki mekanisme pengitungan 40 persen untuk sarana dan 60 persen untuk pelayanan jasa. Penghitungan yang terdapat didalamnya diikuti oleh aturan – aturan yang berlaku sehingga memiliki kesan yang baik, yang dalam Akuntansi syariah merupakan penjabaran prinsip keadilan. (2) . Bentuk Penerapan PSAK No. 23 pada imbalan jasa itu sesuai dengan PSAK No. 23. Dan memiliki tiga jenis jasa yaitu PAD, Kapitasi dan Non kapitasi. Analisis Akuntansi Syariah yang terdapat didalamnya adalah prinsip pertanggungjawaban. (3) Faktor – faktor yang membedakan imbalan jasa sudah sangat baik yang diterapkannya dan mengikuti sumber aturan – aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian jasanya . Hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yakni, prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

Kata Kunci : *PSAK 23, Imbalan Jasa karyawan, Prinsip Akuntansi Syariah.*

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teoritis	10
1. Teori Akuntansi	10
2. Akuntansi keuangan.....	24
3. Pengukuran dan pengakuan pendapatan	26
4. Laporan keuangan.....	30
5. Imbalan Jasa.....	34
C. Tinjauan Konseptual	38
D. Kerangka Pikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
C.	Fokus Penelitian	43
D.	Jenis dan Sumber Data	44
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	44
F.	Uji Keabsahan Data.....	45
G.	Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		49
A.	Mekanisme penghitungan Imbalan Jasa karyawan di Puskesmas Palakka di analisis Akuntansi Syariah.	49
B.	Penerapan PSAK No.23 tentang imbalan jasa karyawan di Puskesmas Palakka di Analisis Akuntansi Syariah.....	61
C.	Menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi perbedaan imbalan jasa karyawan di Puskesmas Palakka dianalisis akuntansi syariah.....	70
BAB V PENUTUP.....		77
A.	Simpulan.....	77
B.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		79



DAFTAR TABEL

NO	NAMA TABEL	HALAMAN
4.1	Mekanisme Pembagian Imbalan Jasa Sesuai dengan Golongan, Jabatan dan Pendidikan	51
4.2	Mekanisme Pembagian Imbalan Jasa PAD	53
4.3	Mekanisme Penghitungan pada Jasa Kapitasi	54
4.4	Mekanisme Penghitung Non Kapitasi	58



DAFTAR GAMBAR

NO	NAMA TABEL	HALAMAN
2.1	Bagang Kerangka Pikir	41



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	HALAMAN
1	Pedoman Wawancara	82
2	Surat Izin Penelitian dari Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	84
3	Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Barru	85
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti	86
5	Surat Keterangan wawancara	87
6	Dokumentasi Wawancara	91
7	Mekanisme Pembagian Imbalan Jasa	94
8	Profil Puskesmas Palakka	102
9	PSAK No. 23 (Pendapatan)	108
10	Biodata Penulis	121

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

س	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dhad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

2. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ / إ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُ / أ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُوٌّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun

- w. = Wafat tahun
 QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
 HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص = صفحة
 دم = بدون
 صلعم = صلى الله عليه وسلم
 ط = طبعة
 بن = بدون ناشر
 الخ = إلى آخرها / إلى آخره
 ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagian.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dari tahun ke tahun memiliki banyak ketenagakerjaan puskesmas yang beroperasi pada setiap daerah–daerah yang ada di Indonesia demi untuk menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas, merupakan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk pelayanan dasar, dan melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat serta pengembangan upaya kesehatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, antara lain puskesmas pembantu (pustu) dan polindes (Poliklinik Desa).

Puskesmas mendapatkan dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, puskesmas mempunyai tanggung jawab penuh untuk melaporkan kegiatan usahanya ke pemerintah pusat maupun ke pemerintah daerah melalui SP2TP atau system pencatatan dan laporan terpadu puskesmas, SP2TP adalah pencatatan atau pelaporan data umum, sarana tenaga, dan pelayanan kesehatan di puskesmas.¹

Pengertian Puskesmas adalah suatu organisasi pelayanan kesehatan mandiri yang bertanggungjawab pada wilayah kerjanya. Istilah mandiri dalam pengertian Puskesmas hanya sebatas kemandirian menentukan kegiatan pelayanan yang akan di laksanakan (namun tidak termasuk dalam pembiayaan

¹ Indra Bastian, *Akuntansi Kesehatan*, (Yogyakarta: PT Glora Aksara Pratama,2008), h. 39

kegiatan). Puskesmas tetap melakukan tiga fungsinya, namun dengan berbagai penyempurnaan, sesuai tuntutan pembangunan kesehatan. Sebagai organisasi pelayanan mandiri, kewenangan yang dimiliki puskesmas.²

Kesehatan pada dasarnya merupakan suatu prioritas bagi semua orang. Demi menjaga kesehatan, setiap orang berusaha semampu mungkin dan semaksimal mungkin menjaganya dikarenakan kesehatan itu sangat penting bagi setiap orang, maka tidak sedikit orang berusaha melakukan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terkait kesehatannya dikemudian hari dengan mengikuti asuransi kesehatan yang ditawarkan oleh perusahaan swasta maupun pemerintah pasien yang datang berobat di puskesmas.

Puskesmas palakka adalah puskesmas seperti halnya puskesmas-puskesmas lainnya yang memberikan pelayanan kesehatan bagi setiap pasien atau konsumen yang dilayaninya, dalam hal ini puskesmas palakka kabupaten Barru memiliki wadah pemeriksaan kesehatan diluar dari puskesmas Palakka.

pelaksanaan akuntansi, terutama akuntansi pendapatan yang di terima entitas. Besarnya pendapatan entitas yang diterima akan memengaruhi laba yang diperoleh. Saat ini penerapan peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tidak hanya diterapkan pada perusahaan saja, tetapi diterapkan juga di sektor publik seperti rumah sakit. Pada setiap periode akuntansi pusat kesehatan masyarakat pada umumnya akan membuat laporan keuangan. Berdasarkan laporan yang dibuat, pihak-pihak yang berkepentingan dalam pusat kesehatan masyarakat dapat melihat posisi keuangan puskesmas dan pihak manajemen

² Indra Bastian, *Akuntansi Kesehatan*, (Yogyakarta: PT Glora Aksara Pratama,2008), h. 38

dapat mengambil keputusan kebijakan-kebijakan guna kelangsungan puskesmas untuk kedepannya, karena semakin besar pendapatan yang didapatkan puskesmas maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam membiayai semua pengeluaran dan operasional puskesmas.

Standar Akuntansi Keuangan menyatakan permasalahan utama dalam akuntansi mengenai pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaat ini dapat diukur secara andal.³

Pengukuran pendapatan dalam PSAK No. 23 Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa pendapatan di ukur dengan nilai wajar imbalan yang di terima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi persetujuan antara entitas dengan pembeli atau pengguna asset tersebut. Jumlah pendapatan tersebut di ukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat di terima di kurangi jumlah diskon usaha dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Jika barang atau jasa di pertukarkan untuk barang dan jasa dengan sifat dengan nilai serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan laporan, yang selanjutnya disebut imbalan jasa.

Imbalan jasa karyawan Puskesmas Palakka itu memiliki system kerja seperti puskesmas lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Barru. Imbalan ini mengandung arti tidak sekedar dalam bentuk finansial saja, seperti langsung berupa gaji, upah, komisi, dan bonus, serta tidak langsung berupa asuransi,

³ Rahma Putri, *Analisis penerapan pendapatan Berdasarkan PSAK NO. 23 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan*. (Skripsi Program Studi akuntansi, Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, h.2.

bantuan sosial, uang cuti, uang pensiun, pendidikan, dan sebagainya tetapi juga bentuk bukan finansial. Bentuk ini berupa pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Bentuk pekerjaan berupa tanggung jawab, perhatian, kesempatan, dan penghargaan, sementara bentuk lingkungan pekerjaan berupa kondisi kerja, pembagian kerja, status dan kebajikan.⁴

Imbalan jasa karyawan bisa terjadi didalam dua factor yaitu internal dan eksternal dikarenakan puskesmas juga menyiapkan jasa bukan hanya pada saat jam kantor saja melainkan menyiapkan jasa untuk orang yang tidak mampu untuk pergi ke puskesmas tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penghitungan imbalan jasa karyawan di puskesmas Palakka Kabupaten Barru di analisis dari Akuntansi Syariah ?
2. Bagaimana penerapan PSAK No. 23 pada imbalan jasa karyawan di Puskesmas Palakka di analisis Akuntansi syariah ?
3. Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi perbedaan imbalan jasa pada masing - masing karyawan di Puskesmas Palakka Kab. Barru dianalisis dari Akuntansi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana mekanisme penghitungan imbalan jasa karyawan di puskesmas Palakka Kabupaten Barru dianalisis dari Akuntansi Syariah.

⁴ Rahma Putri, *Analisis penerapan pendapatan Berdasarkan PSAK NO. 23 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan*. (Skripsi Program Studi akuntansi, Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020., h. 237.

2. Untuk menganalisis penerapan psak no. 23 pada imbalan jasa Karyawan di puskesmas palakka kabupaten Barru dianalisis dari Akuntansi Syariah.
3. Untuk menganalisis faktor – faktor apakah yang mempengaruhi perbedaan imbalan jasa Karyawan di Puskesmas Palakka dianalisis dari Akuntansi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya akuntansi keuangan syariah terkait penerapan PSAK 23 tentang pendapatan karyawan.
 - b. Sebagai salah satu referensi untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah serupa atau terkait dengan penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi instansi diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sarana informasi dan referensi kepada pihak PUSKESMAS PALAKKA KAB. BARRU dalam pengembangan penerapan PSAK 23 tentang pendapatan karyawan.
 - b. Bagi peneliti, berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pendapatan dalam penerapan PSAK 23.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang PSAK 23 dan pendapatan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menunjang dalam penelitian ini. Hasil penelitian sebelumnya dan perbedaan yang akan diteliti oleh penulis dapat dilihat antara lain:

1. Muhammad Habibi Arif Ginting yang berjudul “Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No.23 Pada Perumnas Regional 1 Medan. Tujuannya untuk mengetahui keseluruhan saham dimiliki oleh pemerintah melalui pengukuran dan pengakuan pendapatan PSAK No. 23.⁵ Hasil penelitian tersebut ada tiga pencapaiannya yaitu Pengakuan pendapatan pada Perum Perumnas Regional I Medan belum menggunakan metode Accrual Basis sebagai pencatatan laporan keuangan, Perusahaan sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya dikarenakan pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar dan Perusahaan sulit untuk menentukan suatu kebijakan karena selalu berpatokan pada kas.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama sama membahas PSAK No. 23 terdapat pula perbedaan yaitu penelitian Muhammad Habibi Arif Ginting membahas tentang masalah saham yang dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan penulis membahas imbalan jasa dianalisis Akuntansi Syariah dengan pendekatan prinsip pertanggungjawaban,

⁵ Muhammad Habibi Arif Ginting, Skripsi: “Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK no.23 pada Perum Perumnas Regional I Medan”, (Medan: repository.umsu.ac.id), h. 29.

prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Dan memiliki tempat instansi yang berbeda.

2. Rahma Putri yang berjudul “Analisis Penerapan Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 Pada PT Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis untuk mengetahui bagaimana penerapan pengukuran dan pengakuan pendapatan pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 23 pengakuan pendapatan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan belum menggunakan metode accrual basis, masih menggunakan metode cash basis yang dicatat dalam menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas sehingga perusahaan sulit untuk menentukan suatu kebijakan karena selalu berpatokan pada kas.⁶

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama sama membahas PSAK No. 23 namun terdapat pula perbedaan yaitu penelitian Rahma Putri membahas secara umum pendapatan. Sedangkan penulis membahas imbalan jasa dianalisis Akuntansi Syariah dengan pendekatan prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Dan memiliki tempat instansi yang berbeda.

⁶ Rahma Putri, *Analisis Penerapan Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan*. (Skripsi Program Studi Akuntansi , Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, h. 32.

3. Rubiah Rahmadani yang berjudul “ Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan berdasarkan PSAK No. 23 pada PT. Fauzi Haya Tour & Travel”. Tujuannya untuk mendapatkan bukti nyata, menganalisis mengetahui bagaimana metode penerapan pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT. Fauzi Haya Tour & Travel Medan.⁷ Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengakuan pendapatan yang di terapkan pada PT. Fauzi Haya Tour & Travel Medan belum sesuai atau belum mengikuti sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan. Pencatatan atau pengakuan pendapatan yang dilakukan perusahaan menggunakan metode cash basis yang mana pendapatan diakui pada saat terjadinya penerimaan pembayaran, PT. Fauzi Haya Tour & Travel Medan tidak mencatat transaksi yang terjadi sebelum kas diterima oleh perusahaan. Hal ini tidak sesuai dengan penerapan PSAK No. 23 tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama – sama membahas PSAK No. 23 namun terdapat pula perbedaan yakni penelitian Rubiah Rahmadani membahas masalah secara umum tentang penerapan PSAK No. 23. Sedangkan penulis membahas imbalan jasa dianalisis Akuntansi Syariah dengan pendekatan prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Dan memiliki tempat instansi yang berbeda.

⁷ Rubiah Rahmadani, “ Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan berdasarkan PSAK No. 23 pada PT. Fauzi Haya Tour & Travel”. Skripsi Program Studi Akuntansi Syariah, Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021, h. 6

4. Muhammad Edo Triartha yang berjudul “ Analisi Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Serta Pengakuan Beban Berdasarkan PSAK No. 23 Pada PT. Semen Batugraja (PERSERO) TBK Palembang Periode 2018 – 2020”. Tujuannya yaitu untuk menentukan kapan suatu penghasilan diakui sebagai pendapatan dan biaya sebagai beban.⁸ Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan dan beban pada PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Palembang. Pengakuan pendapatan menggunakan metode cash basis dikarenakan penjualan barang dan jasa dilakukan secara tunai sedangkan pengakuan beban menggunakan metode accrual basis transaksi dicatat pada saat terjadinya pengeluaran walaupun uang tersebut belum benar-benar dikeluarkan .Pengukuran Pendapatan PT. Semen Baturaja Palembang berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima dalam bentuk kas atau setara kas telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, karena selama ini perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan satuan rupiah. Hal itu telah sesuai dengan PSAK No.23. Penelitian ini mempunyai kesamaan yang akan dilakukan yakni sama – sama membahas PSAK No. 23 namun terdapat pula perbedaan yaitu penelitian Muhammad Edo Triartha membahas tentang pengakuan beban. Sedangkan penulis membahas imbalan jasa dianalisis Akuntansi Syariah dengan pendekatan prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Dan memiliki tempat instansi yang berbeda.

⁸ Muhammad Edo Triartha, “ *Analisi Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Serta Pengakuan Beban Berdasarkan PSAK No. 23 Pada PT. Semen Batugraja (PERSERO) TBK Palembang Periode 2018 – 2020*”. Skripsi Program Studi Akuntansi, Palembang, Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti, 2021, h. 3.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep – konsep yang menjadi grandteori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya.

Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah :

1. Teori Akuntansi

a. Pengertian akuntansi

Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian ekonomi perusahaan yang dapat diukur dengan satuan moneter dan hasilnya diinterpretasikan. Tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi keuangan perusahaan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Menurut Rudianto Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas atau transaksi suatu badan usaha dalam bentuk informasi keuangan⁹.

Menurut Walter Akuntansi merupakan suatu sistem informasi, yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis¹⁰.

Menurut James M Reeve, dkk Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan. Selain itu akuntansi

⁹ Rudianto. Akuntansi koperasi: edisi kedua (Jakarta:erlangga, 2010). h. 10

¹⁰ Walter t Harrison jr. akuntansi keuangan IFRS edisi ke delapan jilid satu. (Jakarta: erlangga, 2012). h. 3

juga memberikan informasi untuk pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja perusahaan¹¹.

Sedangkan menurut Warren, dkk “Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”¹².

Surwadjono menyatakan bahwa Akuntansi dapat didefinisikan sebagai seperangkat yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik.¹³

Sedangkan menurut Paul Gradi akuntansi yaitu sebagai fungsi organisasi secara sistematis, dapat dipercaya dan original dalam mencatat, mengklasifikasi, memproses, membuat ikhtisar, menginterpretasi, dan menganalisa seluruh transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional perusahaan sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya¹⁴.

Akuntansi menurut Sumarsan adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat

¹¹ James M Reeve dkk. Accounting (pengantar akuntansi) (ariaparahnita dan taufiq hendrawan). (Jakarta:salemba empat, 2008). h. 9

¹² Warren s. carl, dkk. Accounting Indonesia adaptation. (Jakarta: salemba empat, 2014). h. 3

¹³ Suwardjon. Teori akuntansi perekayaan pelaporan keuangan. (yogyakrata: BPEN-yogyakarta. 2015). h. 10.

¹⁴ Paul gradi. Teori akuntansi. (Jakarta:erlangga,2017). h. 19.

menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan¹⁵.

Menurut American Accounting Association (AAA), pengertian akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi dengan memungkinkan adanya sebuah penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.¹⁶

Berdasarkan definisi diatas akuntansi merupakan dapat diartikan sebagai sistem pencatatan dan pengelompokan pada bidang keuangan untuk pertanggung jawaban pada setiap periode dalam satu tahunnya dan memberikan informasi tentang ekonominya pada perusahaan tersebut.

Teori akuntansi merupakan suatu penalaran logis mengevaluasi dan mengembangkan praktik akuntansi. Hasil penalaran logis adalah suatu kerangka konseptual yang menjadi semacam konstitusi akuntansi. Secara umum teori akuntansi adalah suatu cabang ilmu akuntansi yang terdiri dari pernyataan sistematis tentang prinsip-prinsip dan metodologi yang membedakannya dengan praktik. Teori akuntansi adalah suatu sistem yang komprehensif meliputi postulat dan teori yang berkaitan dengannya.¹⁷

b. Jenis – jenis teori akuntansi

Pada dasarnya, teori akuntansi adalah bentuk penalaran logis yang mengevaluasi dan mengembangkan praktik-praktik akuntansi. Hasil dari

¹⁵ Tomas sumarsan. Perpajakan Indonesia. (Jakarta: indeks, 2017). h. 1

¹⁶ Husnul Abdi, “*Pengertian Akuntansi Menurut Para Ahli*” <https://hot.liputan6.com>, (diakses pada tanggal 27 Februari 2022)

¹⁷ Harahap Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi*, ed. Reka Studio Grafis (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). h. 102.

penalaran yang logis tersebut berupa kerangka konseptual yang terjadi bentuk konstitusi akuntansi tersendiri. Akuntansi dalam hal ini juga memiliki tujuan untuk dicapai sehingga membahas bentuk pertimbangan nilai atau value judgement. Teori akuntansi dibedakan menjadi berbagai jenis, seperti berikut ini:

1) Teori Akuntansi politik

Teori ini menjelaskan tentang fenomena akuntansi seperti adanya atas dasar pengamatan empiris pada setiap aktivitas keuangan di perusahaan atau lembaga. Dalam praktiknya teori jenis ini berusaha mencari hal-hal yang baik dan tepat untuk menghasilkan keuntungan atau kebaikan semaksimal mungkin.

2) Teori Akuntansi Normatif

Teori ini menjelaskan tentang fenomena akuntansi untuk menjustifikasi dan membenarkan standar akuntansi dengan tujuan yang harus dicapai atas kehadiran dan pembentukannya. Berdasarkan pada aspek tataran estetikasemiotika yang membahas tentang teori umum dengan tanda-tanda dan simbol-simbol di bidang linguistik.¹⁸ Teori akuntansi normatif dibedakan menjadi beberapa jenis seperti berikut ini:

- a) Teori sintaktik adalah teori yang membahas tentang pelaporan keuangan dan memberi penalaran tentang mengapa data atau informasi bisa disajikan dengan cara tersebut.

¹⁸ Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). h.129-130.

b) Teori semantik adalah teori yang menjelaskan tentang perhatian pada masalah-masalah yang ada atau symbol yang digunakan sebagai bentuk pengukuran dan penyajian kegiatan operasi dan objek fisik pada perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Teori ini juga membahas tentang penalaran mengapa kegiatan perusahaan bisa disimbolkan dengan cara-cara tertentu untuk membentuk suatu strategi tertentu pula.

c) Teori pragmatik adalah membahas tentang pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku dalam penggunaan laporan keuangan. Teori ini menjelaskan bagaimana reaksi pihak yang dituju oleh informasi-informasi akuntansi yang digunakan secara tepat.¹⁹

c. Tujuan teori akuntansi

Dalam praktiknya, akuntansi memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam aktivitasnya sehingga digunakan dan diterapkan sebaik mungkin agar bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut, seperti berikut ini:

- 1) Dapat menjadi data untuk melakukan evaluasi dan menjelaskan prinsip akuntansi,
- 2) Hasil akuntansi bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks dan menyeluruh.
- 3) Dapat memecahkan masalah secara lebih tepat,

¹⁹ Yadiati Winwin, *Teori Akuntansi*, ed. Jefry (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). h. 45-48.

- 4) Dapat memprediksi sesuatu yang akan terjadi dalam jangka waktu dan kondisi tertentu,
 - 5) Dapat membantu mengidentifikasi, menjelaskan hingga dapat menyimpulkan bentuk fenomena dalam bidang akuntansi.²⁰
- d. Prinsip – Prinsip Akuntansi
- 1) Prinsip Dasar Akuntansi
prinsip dasar akuntansi mendasari akuntansi dan seluruh laporan keuangan. Prinsip akuntansi dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi, serta sebagai dasar pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Berikut ini prinsip dasar akuntansi:
 - a) Prinsip Biaya Historis (*Historical Cost Principle*)
GAAP mewajibkan sebagian besar aktiva dan kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisi. Hal ini seringkali disebut prinsip biaya historis. Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal dan biaya.
 - b) Prinsip Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition Principle*)
Prinsip pengakuan pendapatan adalah aliran masuk harta-harta (aktiva) yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama satu periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya

²⁰ Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). h.130-131.

pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak yang bebas.

c) Prinsip Mempertemukan (*Matching Principle*)

Yang dimaksud prinsip mempertemukan biaya adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Karena biaya itu harus dipertemukan dengan pendapatannya, maka pembebanan biaya sangat tergantung pada saat pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan suatu pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya juga akan ditunda sampai saat diakuinya pendapatan.

d) Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka metode dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Sehingga bila terdapat perbedaan antara suatu pos dalam dua periode, dapat segera diketahui bahwa perbedaan itu bukan selisih akibat penggunaan metode yang berbeda.

e) Prinsip Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure Principle*)

Yang dimaksud dengan prinsip pengungkapan lengkap adalah menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Karena informasi yang disajikan itu merupakan ringkasan dari

transaksi-transaksi dalam satu periode dan juga saldo-saldo dari tekening-rekening tertentu, tidaklah mungkin untuk memasukkan semua informasi-informasi yang ke dalam laporan keuangan.²¹

2) Prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah memiliki peran yang cukup penting khususnya dalam berkelangsungan ilmu akuntansi, terutama di Indonesia yang dimana sebagian besar masyarakatnya mayoritas muslim. Pada hakikatnya, akuntansi syariah tidak akan pernah lepas dari berkembangnya agama islam di Indonesia. Umat islam berkewajiban mencatat setiap transaksi non tunai Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah {2} : 282 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بَدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَاَلْيَكْتُبَ وَيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللّٰهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيًْۤٔاۗ اِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ لِوَلِيِّهٖ بِالْعَدْلِ وَاَسْتَشْهَدُوْا شٰهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاَمْرَاَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاٰخْرٰى وَلَا يَأْب الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسُوْءُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلٍۭ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تَجْرَةً حَآضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَاَسْتَشْهَدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شٰهِيْدٌ وَاِنْ تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيَعْلَمْكُمْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۙ ۲۸۲

²¹ Jusup Al Haryono, *Dasar Dasar Akuntansi* (Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2011). h. 183-185.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah{2} ayat 282).²²

Maksud dari ayat tersebut secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman yang melakukan transaksi utang. Selain itu dijelaskan pula tentang perlunya seseorang atau pihak untuk mencatat transaksi piutang. Surah diatas juga berbicara tentang orang beriman yang melakukan transaksi jual beli barang secara kredit atau pembelian dan menjual saham yang penyerahannya kepada pembeli tertunda sampai batas waktu tertentu. Itu sebabnya Allah memerintahkan transaksi itu ditulis

²² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h. 48

dengan menyebutkan hari, bulan, tahun pembayaran yang dijanjikan se jelas mungkin.

a) Prinsip pertanggung jawaban

Prinsip pertanggung jawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil taransaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh Allah SWT²³. Untuk menjalankan fungsi kekhalifaaan di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamankan dan diperbuat kepada pihak – pihak yang terkait.

b) Prinsip Keadilan

Menurut penafsiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan social dan bisnis, dan nilai inheren yang melekat dalam fitra manusia. Hal ini berarti manusia pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam aspek setiap kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surah Al- Baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 265 juta, maka akuntan (perusahaan) harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal

²³ Muammar khaddafi, dkk. Akuntansi syariah: meletakkan nilai-nilai syariah islam dalam ilmu akuntansi. (medan:medenater,2017). h, 17.

transaksi. Secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dengan kata lain tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan²⁴.

c) Prinsip kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip kebenaran. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selaluh dihadapkan dengan masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivita ini akan dapat dilakukan akan baik jika dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan, mengakui, mengukur dn melaporkan transaksi – transaksi dalam ekonomi. Maka, pengembangan akuntansi islam, nilai –nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktuluasasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai–nilai kebenaran membentuk akuntansi syriah dapat diterangkan²⁵.

Berdasarkan pada nash–nash Al-Qur’an yang telah dijelaskan tentang konsep akuntansi dan prinsip – prinsip akuntabsi syriah, maka dapat disimpulkan bahwa ciri–ciri akuntansi syriah sebagai berikut :

1. Dilaporkan secara benar
2. Cepat dalam pelaporannya
3. Dibuat oleh ahlinya (akuntan)
4. Terarah, jelas, tegas dan imformatif
5. Memuat informasi yang menyeluruh

²⁴ Muammar khaddafi, dkk. Akuntansi syriah: meletakkan nilai-nilai syriah islam dalam ilmu akuntansi. (medan:medenater,2017). h, 17.

²⁵ Muammar khaddafi, dkk. Akuntansi syriah: meletakkan nilai-nilai syriah islam dalam ilmu akuntansi. (medan:medenater,2017). h, 17.

6. Informasi yang ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan
7. Terperinci dan teliti
8. Tidak terjadi manipulasi
9. Dilakukan secara kontiniu (tidak lalai)

Pendirian perusahaan oleh pemilik modal menyangkut utang-piutang antara dia dan manajennya. Pengelolaan harta pemilik modal oleh manajenen merupakan hubungan kerja sama, utang-piutang (atau *agency relationship*). Oleh karena itu, setiap lembaga perusahaan syarat dengan kegiatan muamalat sebagaimana dimaksud ayat 282 di atas²⁶. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pemeliharaan akuntansi wajib hukumnya dalam suatu perusahaan bahkan juga pribadi. Dalam Islam selalu ditekankan jangan melakukan kecurangan dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Ketentuan ini harus ditegakkan dengan cara apa pun. Harus ada sistem yang dapat menjaga agar semua hak-hak *stakeholders* termasuk hak social, lingkungan dan pemerintah dijaga dan jangan sampai ada yang dirugikan dalam kontrak kerja sama apakah dalam bidang jual beli, mudharabah, atau musyarakah.

Tekanan dalam kewajiban melakukan pencatatan sebagai berikut:

- a) Menjadi bukti dilakukannya transaksi (muamalah) yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya.

²⁶ Muammar khaddafi, dkk. Akuntansi syariah: meletakkan nilai-nilai syariah islam dalam ilmu akuntansi. (medan:medenater,2017). h,18

- b) Menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan, baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu (laba).

Adapun tujuan pencatatan dalam akuntansi yaitu.

- a) Pertanggungjawaban (*accountability*) atau sebagai bukti transaksi.
- b) Penentuan pendapatan (*income determination*).
- c) Informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan lain-lain.

Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat dan dalam entitas atau organisasi dengan semua *stekeboldernya*, karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasinya.²⁷ Pentingnya keadilan ini dapat dilihat dari Al-Qur'an surah Al-Hadid (57) : 24 sebagai berikut.

الَّذِينَ يَخُلُونِ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُحْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۚ ٢٤

Terjemahnya:

(24) (yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) maka sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Hadid {57} : 24).²⁸

Maksud dari ayat tersebut adalah orang – orang yang sombong itu orang – orang yang kikir dengan harta mereka, mereka tidak menafkahnnya di jalan Allah dan juga membahas barangsiapa berpaling dari ketaatan kepada Allah, ia tidak merugikan kecuali dirinya sendiri,

²⁷ Harahap Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi*, ed. Reka Studio Grafis (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bnadung: Syamil Qur'an, 2009), h. 540

dan sama sekali tidak merugikan Allah.. Sesungguhnya Allah maha kaya tidak butuh pada hambanya melainkan hambalah yang butuh kepadanya.

Rasullullah SAW pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntansi dengan sebutan “hafazhatul amwal” (pengawas keuangan). Dalam Al-Qur’an disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Dalam Al-Qur’an surah Ash-Shu’ara {26} : 181-184 yang berbunyi:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ۝ ١٨٤﴾

Terjemahnya:

(181) Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, (182) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, (183) Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan, (184) dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu".(Q.S. Ash-Shu’ara {26} ayat 181-184).²⁹

Maksud dari ayat diatas adalah mereka disuru menyempurnakan takaran ditimbangan baik di waktu menjual atau membeli. Mengurangi atau melebihi takaran dan timbangan adalh perbuatan yang merugikan dan bisa disebut tidak memanusiakan manusia sedangkan kita hidup untuk bertakwah kepada Allah untuk melakukan kebaikan dan menghindari yang namanya kecurangan.

²⁹ Kementrian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur’an, 2009), h. 374-375

Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Qur'an, Sunah Nabwiyyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu dan 'Urf) yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat islam, dan termasuk disiplin ilmu social yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat pada tempat penerapan tersebut.

2. Akuntansi keuangan

Menurut Kieso & Weygant Akuntansi Keuangan ialah serangkaian proses yang berujung pada penyusunan laporan keuangan yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan untuk dipakai oleh pengguna laporan keuangan baik internal ataupun eksternal perusahaan³⁰.

Menurut Sugiarto Akuntansi Keuangan ialah bidang dalam akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan keuangan pada suatu perusahaan yang dilakukan secara bertahap. Laporan ini sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham atau investor. Persamaan akuntansi yang digunakan ialah Aset sama dengan Ekuitas ditambah Liabilitas yang berpatokan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK)³¹.

Menurut Warren Reeve Fess Dalam buku "Pengantar Akuntansi", Warren Reeve Feves menjelaskan:

"Financial accounting is primarily concerned with the recording and reporting of economic data and activities for a business. Although such reports

³⁰ Kieso dan weygan Dt. Intermediate accounting: akuntansi intermediate diterjemahkan herman wibowo edisi ketujuh jilid satu. (Jakarta: dinarupa aksara, 2000). h. 6

³¹ Endar sugiarto. Psikologi pelayanan dalam industry jasa.(Jakarta: PT. gramedia pustaka utama, 2002). Hal 52

provide useful information for managers, they are the primary reports for owners, creditors, governmental agencies, and the public”³². Maksudnya : Akuntansi keuangan ialah pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan ekonomi perusahaan. Walaupun laporan tersebut menghasilkan informasi yang berguna bagi manajer, namun hal itu merupakan laporan utama bagi pemilik (owner), kreditor, lembaga pemerintah dan masyarakat umum.

Menurut Donald E. Kieso, dkk. Dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Intermediate” Akuntansi keuangan ialah sebuah proses yang berujung pada pembuatan laporan keuangan berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan untuk dipakai baik oleh pihak-pihak internal maupun oleh pihak eksternal”³³.

Menurut Martani Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal. Bermacamnya pihak eksternal dengan tujuan mendetail bagi masing-masing pihak membuat pihak pembuat laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam pembuatan laporan keuangan³⁴.

Untuk itu diperlukan standar akuntansi yang bisa dijadikan acuan baik oleh penyusun maupun oleh penerima laporan keuangan. Laporan yang disajikan dari akuntansi keuangan ialah laporan keuangan untuk keinginan umum dengan bahasa lain general purpose financial statement.

Menurut Jogianto Akuntansi keuangan ialah penyediaan informasi yang relevan berupa laporan-laporan berkala, seperti income statement, balance

³² Warren Reeve Fess. Accounting Indonesia adaptation: pengantar akuntansi. (Jakarta: salemba empat, 2014). H. 3

³³ Kieso Donal E, dkk, Akuntansi Intermediate. Edisi Keduabelas. (Jakarta:Erlangga, 2007). h. 2.

³⁴ Dwi Martani. Akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK. (Jakarta: salemba empat, 2012). h. 8

sheet, retained earning, laporan perubahan modal yang dipakai baik oleh pihak internal ataupun eksternal perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam manajemen mengambil keputusan³⁵.

Akuntansi Keuangan dapat disimpulkan dari defenisi diatas adalah rumpun ilmu dari akuntansi yang berhubungan dengan cara pelaporan perusahaan kepada pelaku ekonomi baik secara internal maupun eksternal yang biasanya laporan berbentuk arus kas, perubahan modal, rugi laba dan neraca.

Pihak eksternal contohnya pemegang investor ,saham, kreditor. Semakin baik pelaporan keuangan yang akan memberikan effect kepada baiknya kredibilitas sebuah perusahaan.

Akuntansi keuangan mempunyai peran yang begitu penting dan utama dalam menyajikan laporan kondisi terbaru perusahaan sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan perusahaan.

Tujuan Pelaporan Keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan suatu entitas yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas.

3. Pengukuran dan pengakuan pendapatan

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dan pembeli atau pengguna asset

³⁵ H.m. jogianto. System informasi berbasis computer.(Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 1997). h.54.

tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.

Dalam PSAK 23, pendapatan terdiri dari:

- a. Penjualan Barang
- b. Penjualan Jasa
- c. Bunga
- d. Royalty
- e. Dividen

Pengakuan masing-masing jenis pendapatan menurut PSAK³⁶ adalah:

- a. Paragraf 14 PSAK 23 menyatakan bahwa “Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi:
 - 1) Entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kpd pembeli;
 - 2) Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
 - 3) Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal;
 - 4) Kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas; dan
 - 5) Biaya yg terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal”.

³⁶ Dwi Martani. Akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK. (Jakarta: salemba empat, 2012). h. 10

Apabila salah satu dari kelima syarat tersebut tidak terpenuhi dalam suatu transaksi penjualan, maka entitas tidak dapat mengakuinya sebagai suatu pendapatan.

- b. Paragraf 20 PSAK 23 menyatakan bahwa “Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi:

- 1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- 2) Kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas;
- 3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal; dan
- 4) Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal”.
- 5) Apabila salah satu dari keempat syarat tersebut tidak terpenuhi dalam suatu transaksi penjualan jasa, maka entitas tidak dapat mengakuinya sebagai suatu pendapatan.

- c. Paragraf 29 PSAK 23 menyatakan bahwa “Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen diakui jika:

- 1) Kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas.

- 2) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.

Dalam paragraf 30 dinyatakan bahwa “Pendapatan diakui dengan dasar sebagai berikut:

- 1) Bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana dijelaskan di PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran paragraf 09 dan PA 05-08;
- 2) Royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan; dan
- 3) Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Uraian di atas, pengakuan pendapatan yang diatur dalam SAK ternyata memiliki syarat yang lebih ketat dibanding dengan yang diatur dalam SAP, yaitu adanya unsur terpenuhinya semua syarat pengakuan pendapatan maupun harus terpenuhinya “Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas”. Ukuran untuk menilai adanya kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas menunjukkan bahwa SAK sangat konservatif terhadap pengakuan pendapatan³⁷.

Pengukuran pendapatan dalam PSAK No.23 Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah Pendapatan timbul dari transaksi hasil persetujuan antara entitas dengan pembeli atau pengguna asset

³⁷ Joni Afandi “ *Pengakuan Pendapatan menurut SAK dan Pengakuan Pendapatan menurut SAP*”. Diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

tersebut. Jumlah pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon usaha dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang dan jasa dengan sifat dan nilai serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan.

Nelson Lam menyatakan bahwa pendapatan diukur pada nilai wajarnya dari pembayaran diterima atau dapat diterima ke dalam pencatatan jumlah dari banyak potongan dan potongan harga yang ditentukan entitas. Entitas biasanya menentukan jumlah dari pendapatan yang muncul pada transaksi dengan merujuk pada perjanjian antara entitas dan pembeli atau pengguna dari aset³⁸.

Harahap menyatakan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi³⁹.

4. Laporan keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut⁴⁰.

Menurut Hanafi laporan keuangan merupakan informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan, mulai dari investor atau calon investor

³⁸ Nelson lam dan lau peter. Akuntansi keuangan (intermediate financial reporting) buku 1. (Jakarta:salemba empat,2014). h. 317.

³⁹ Harahap sofyon syafri. Analisis kritis atas laporan keuangan edisi pertama cek.10.(Jakarta:PT. bumi aksara,2011). h. 96

⁴⁰ Munawir. S. analisa laoran keuangan. (Yogyakarta: liberty, 1995). h. 2

sampai dengan manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko, timing aliran kas, yang kesemuanya akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan⁴¹.

Menurut Munawir laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan keuangan dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan perhitungan laporan laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama tertentu, dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan⁴².

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang penting bagi perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data yang terdiri dari neraca, dan perhitungan laba-rugi serta keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampirannya.

Laporan keuangan merupakan suatu informasi keuangan yang memberikan gambaran kondisi dan kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri: Neraca, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan yang disajikan berupa Laporan Arus Kas atau Laporan Arus Dana, Catatan dan Laporan Lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan⁴³.

⁴¹ Mamduk hanafi dan abdul halim. Analisa laporan keuangan.(Yogyakarta: UPP AMP YKPM, 2003). h. 69

⁴² Munawir. S. analisa laporan keuangan. (Yogyakarta: liberty, 1995). h. 5

⁴³ Irham Fahmi. Analisis laporan keuangan. (lampulo: ALFABETA, 2011). h. 22.

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi keuangan mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi ekonomi perusahaan. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan tersebut⁴⁴.

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan laporan keuangan secara umum yakni memberikan informasi keuangan: (1) mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan; (2) perubahan sumber-sumber ekonomi netto (sumber dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari aktivitas-aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba (3) mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba (4) mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban; dan (5) berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan.

⁴⁴ Herry. Analisis laporan keuangan. (Yogyakarta: CAPS (center for academic publishing service), 2015). h.. 3

Suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan bertujuan untuk menyeragamkan penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun 2009 yang memuat aturan-aturan yang digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan yang berkualitas harus mencakup beberapa unsur pokok yaitu:

- a. Dapat dipahami: kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya Anna Ina Wae Beribe, Jullie J. Sondakh, 1-9 4 untuk segera dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan.
- b. Relevan: informasi harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.
- c. Keandalan: informasi harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari seharusnya disajikan, atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
- d. Dapat diperbandingkan: laporan keuangan harus dapat diperbandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja perusahaan, serta mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.⁴⁵

⁴⁵ Ikatan Akuntansi Indonesia, “*Standar Akuntansi Keuangan*”, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2009).

5. Imbalan Jasa

a. pengertian imbalan jasa

Imbalan Jasa (*compensation*) memiliki cakupan yang lebih luas dari upah atau gaji. Imbalan jasa adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pekerja dan diterima serta dinikmati oleh pekerja baik secara langsung atau tidak langsung⁴⁶. Imbalan jasa langsung (*Direct Compensation*) merupakan imbalan yang diterima secara rutin atau per periode oleh pekerja, imbalan ini mencakup gaji pokok/upah, tunjangan tunai sebagai penambah gaji yang diterima setiap bulan, tunjangan hari raya keagamaan, gaji ke 13 dan 14 bonus yang dikaitkan atau tidak dengan kinerja perusahaan dan penghargaan prestasi. Imbalan jasa tidak langsung (*Indirect Compensation*) merupakan imbalan yang diterima pekerja tidak secara rutin, imbalan ini mencakup fasilitas transportasi, biaya pemeliharaan kesehatan, upah selama cuti atau meninggalkan pekerjaan, bantuan untuk kecelakaan kerja, bantuan pendidikan gratis, asuransi jamsostek dan iuran pensiun⁴⁷.

Moekijat menyatakan bahwa imbalan jasa merupakan balas jasa kepada pegawai karena yang bersangkutan telah memberi bantuan atau sumbangan untuk mencapai tujuan organisasi. Imbalan jasa diberikan karena partisipasi pekerja kepada organisasi yang mencakup gaji, upah, perumahan dinas, fasilitas kendaraan, pakaian kerja, tunjangan makan, tunjangan rumah dinas, dan tunjangan lainnya⁴⁸.

⁴⁶ Ruky Achmad S. Sistem Manajemen Kinerja. (Jakarta:PT Gramedia, 2001). h,30.

⁴⁷ I Ruky Achmad S. Sistem Manajemen Kinerja. (Jakarta:PT Gramedia, 2001). h,30.

⁴⁸ Moekijat. Administrasi Gaji Dan Upah: *cetakan pertama*. (Bandung: Mandar Maju,1992).

Imbalan jasa merupakan jenis penghargaan yang paling penting dalam perusahaan, oleh karena itu pihak manajemen perusahaan harus betul-betul mempertimbangkan masalah imbalan karyawannya. Apabila karyawan menerima imbalan rendah maka tidak ada kemauan untuk bekerja keras, hal ini disebabkan karena imbalan terutama gaji termasuk dalam alat untuk memenuhi kebutuhan dasar, sejalan dengan teori Frederick Herzberg tentang faktor *dissatisfier* atau ketidakpuasan imbalan jasa akan membuat pekerja merasa kecewa dan akan banyak menimbulkan masalah⁴⁹.

Menurut Handoko imbalan jasa merupakan segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 100 menyatakan bahwa imbalan jasa merupakan upah/gaji, gaji pokok atau gaji minimum dan upah pekerja tersebut, atau ada kerja sama dengan Badan Kekuasaan Perundingan Serikat Pekerja dengan perusahaan tersebut dan ada nilai relatif jabatan⁵⁰.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa imbalan jasa atau kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan yang diberikan oleh perusahaan sebagai balas jasa atas sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Imbalan Jasa

Imbalan jasa merupakan faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa karyawan bekerja pada suatu perusahaan dan

⁴⁹ Ruky Achmad S. Sistem Manajemen Kinerja. (Jakarta:PT Gramedia, 2001). h,30.

⁵⁰ T. Hani Handoko. Manajemen Edisi 2. (Yogyakarta: BPFE. 2003)

bukan pada perusahaan lain. Imbalan jasa dapat berbentuk intrinsik (*internal*) dan ekstrinsik (*eksternal*). Imbalan intrinsik mencakup aspek psikologis dan sosial seperti pemberian pujian, sedangkan imbalan ekstrinsik berupa finansial⁵¹.

Ada banyak faktor yang secara langsung atau tidak langsung, menentukan tinggi rendahnya imbalan jasa antara lain: kondisi pasar yang dapat di katakan tidak stabil termasuk harga bahan-bahan makanan dan biaya hidup yang tinggi ini sangat mempengaruhi kepada kehidupan banyak orang, disamping tenaga kerja yang banyak pengangguran, tarif imbalan jasa yang sedang berlaku, memang ada yang minim tapi ada juga yang sudah sesuai dengan upah minimum propinsi atau besar kecilnya biaya hidup, tapi itu tergantung kepada kemampuan perusahaan/pemberi kerja untuk membayar⁵².

c. Tujuan Pemberian Imbalan Jasa

Pemberian imbalan harus memenuhi kriteria: memberikan rasa nyaman (*secure*) sehingga memenuhi kebutuhan dasar karyawan, seimbang (*balanced*) dalam arti pemberian imbalan merupakan bagian dari penghargaan total termasuk didalamnya tunjangan dan promosi, *Cost effective*; memberikan biaya manfaat bagi organisasi, *Acceptable to employee*; disini termasuk tiga hal yang memerlukan pertimbangan apakah pemberian harus dilakukan secara tertutup ataukah diperlukan komunikasi agar tercapai titik temu yang disepakati dan dapat diterima

⁵¹ Mathis Robert, Jackson John. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta : Salemba empat. 2002)

⁵² Ruky Achmad S. Sistem Manajemen Kinerja.(Jakarta:PT Gramedia, 2001). h,30.

oleh semua pihak, ataukah perlu mengikutsertakan karyawan dalam menentukan keputusan terkait dengan sistem imbalan.

Prinsip pemberian imbalan dapat pula dilakukan atas pertimbangan dan perspektif berikut: mudah dikelola; termasuk dalam hal ini mudah ditanggung oleh organisasi, kompetitif; dalam arti mampu bersaing dengan pesaing eksternal atau secara *internal* mampu menimbulkan suasana persaingan yang positif, memotivasi: mampu menimbulkan dorongan untuk bekerja dengan baik, adil memberikan perasaan adil diantara karyawan.

Menurut Handoko pemberian imbalan jasa bertujuan⁵³ sebagai berikut:

1) Memperoleh pegawai yang berkualitas

Biasanya suatu organisasi yang bersaing di pasar tenaga kerja, tingkat imbalannya harus sesuai dengan kondisi *supply and demand* tenaga kerja. Suatu tingkat gaji yang relatif tinggi diperlukan untuk menarik pelamar yang berkualitas.

2) Mempertahankan karyawan yang *Mik*

Bila tingkat imbalan tidak kompetitif, akan banyak karyawan baik yang akan keluar mencari tempat kerja yang lebih memuaskan. *Turn over* karyawan akan tinggi dan secara ekonomis maupun psikologis akan merugikan karyawan.

3) Menjamin Keadilan

Keadilan atau konsistensi *internal* maupun *eksternal* sangat

⁵³ T . Hani Handoko. Manajemen Edisi 2. (Yogyakarta: BPFE. 2003)

penting diperhatikan dalam menentukan tingkat imbalan.

4) Menghargai perilaku yang diinginkan

Pemberian imbalan yang efektif hendaknya mendorong perilaku yang diinginkan, seperti prestasi kerja yang baik, pengalaman, kesetiaan, dan tanggung jawab.

5) Mengendalikan biaya

Suatu program imbalan yang rasional akan membantu organisasi untuk mendapatkan atau mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak.

6) Memenuhi peraturan legal

Pemberian imbalan mempunyai batasan dan peraturan yang legal. Program imbalan yang baik selalu memperhatikan hal tersebut dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur imbalan untuk karyawan.

C. Tinjauan Konseptual

Untuk memahami maksud dari penelitian yang berjudul “Penerapan PSAK 23 tentang Imbalan Jasa Karyawan Puskesmas Palakka Baru” maka dari itu calon peneliti akan memberikan dari definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul tersebut.

1. Penerapan PSAK 23

PSAK Nomor 23 menjelaskan tentang Pendapatan, yang dimana menyatakan bahwa “Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yg timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus

masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal, yang selanjutnya disebut imbalan jasa”.

2. Imbalan

Merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan yang diberikan oleh perusahaan sebagai balas jasa atas sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan/puskesmas.

3. Jasa

Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak yang lain secara prinsip intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terikat dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.

4. Karyawan

Karyawan adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada Pemberi Kerja atau pengusaha atau majikan.

5. Imbalan Jasa

Imbalan Jasa adalah tambahan atau tunjangan yang diterima secara tidak rutin atau semua pengeluaran yang di keluarkan oleh perusahaan atau pekerja dan diterima serta dinikmati oleh pekerja baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Akuntansi Syariah

Secara umum pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan informasi dalam bentuk keuangan yang dapat digunakan dalam bentuk pengambilan keputusan. Syariah adalah aturan yang telah ditetapkan Allah swt untuk dipatuhi oleh manusia untuk menjalani segala aktivitasnya di dunia.⁵⁴

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi dengan sosial. Akuntansi syariah tidak hanya alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi tetapi juga sebagai suatu metode yang menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu harusnya berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syariah dianggap sebagai salah satu perhitungan atau hisab menganjurkan hal yang baik dan melarang apa yang buruk.

Berdasarkan pada penelitian diatas maka yang dimaksud pada judul ini adalah tentang penerapan PSAK 23 pada imbalan jasa karyawan Puskesmas Palakka dengan melihat bagaimana mekanisme penghitungan dan penerapan serta pencatatan jasa yang telah ditetapkan sesuai dengan akuntansi syariah. Maka penulis berfokus pada penelitian berjudul “Penerapan PSAK 23 tentang Imbalan Jasa Karyawan di Puskesmas Palakka Kab. Barru”.

⁵⁴ Muammar Khaddafi dkk, “*Akuntansi syariah*”, h. 13.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variable yang satu dengan variable yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.⁵⁵

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dimulai dari penerapan PSAK No. 23 pada penghitungan imbalan jasa dan factor internal dan eksternal. Selanjutnya penelitian akan dianalisis berdasarkan akuntansi syariah yang membahas mengenai antara lain ; prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Dalam mencapai hasil tujuan dari penerapan PSAK No. 23 tersebut. Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat suatu karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangkah piker sebagai berikut :



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

⁵⁵ Tim penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Parepare”, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020); h. 26.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah berbasis informasi yang diterbitkan IAIN Parepare Nusantara Press. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan pengelolaan data, uji keabsahan data, serta teknik analisis data.⁵⁶

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat diskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif deskriptif adalah studi yang mendiskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.⁵⁷

Pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan *case study research* (studi kasus) yang merupakan suatu pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala – gejala tertentu. Dsigen yang digunakan adalah *single case* yaitu suatu penelitian studi kasus yang menekankan penelitian

⁵⁶Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara press, 2020), h 19.

⁵⁷Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagi Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 172.

hanya pada sebuah kasus.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, yakni data yang berhubungan penerapan PSAK 23 pada imbalan jasa karyawan puskesmas palakka.

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁵⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian dan perolehan data dilakukan pada Puskesmas Palakka Kabupaten Barru.

2. Waktu penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan kurang lebih 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian dalam memilih sumber data yang baik dan relevan. Pada penelitian ini penulis lebih fokus terhadap penerapan PSAK 23

⁵⁸ Aji Djamanuri, “*Metodologi Penelitian Muamalah*” (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h.

pada imbalan jasa karyawan Puskesmas Palakka Kabupaten Barru.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan riil atau tidaknya suatu penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya, dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa wawancara.⁵⁹ Adapun pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti didalam penelitian ini yaitu kepalah Puskesmas atau karyawan yang bekerja di puskesmas Palakka tersebut.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet dan penelittian terdahulu serta sumber-sumber tertulis lainnya yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini yang diambil dari Puskesmas Palakka Kabupaten Barru.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pegumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti, karena tujuan utama peneliti

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

melakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini peneliti terlibat langsung di lokasi atau dengan kata lain penelitian lapangan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan dan pendekatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki.⁶⁰

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada kali ini yaitu manajer atau karyawan yang ada di Puskesmas Palakka Kabupaten Barru untuk menunjang dan membantu proses penyelesaian skripsi peneliti nantinya.

3. Studi dokumen

Dokumen dalam penelitian kualitatif adalah setiap bahan tertulis yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian.⁶¹ Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan yang atau rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

F. Uji Keabsahan Data

1. Uji Credibility (Kepercayaan)

Uji kredibilitas data yaitu uji untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kepercayaan (*credibility*) pada dasarnya berfungsi untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan

⁶⁰ Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan* (Cet I; Malang : UIN Maliki Press, 2010), h. 59.

⁶¹ Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 22.

pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck.⁶²

2. Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Untuk itu peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Dependability

Dalam penelitian kuantitatif, dependability disebut sebagai reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini dependability dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.⁶³

4. Confirmability

Pengujian confirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007),

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007).

confirmability mirip dengan uji Dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.⁶⁴

G. Teknik Analisis Data

Setelah uji keabsahan data dilakukan, data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktifitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁶⁵

1. Reduksi data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, lalu membuang yang tidak perlu.⁶⁶

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Tahapan reduksi tanpa melalui proses pemisahan dan penranpormasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up filed notes*). Data “mentah” adalah data yang sudah terkumpul tetapi belum terorganisasi secara numerik.⁶⁷

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, h. 54.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Elfabeta, 2009), h. 300.

⁶⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122.

⁶⁷ Murarry R. Spiegel dan Larry J. Stephens, *Statistick*, (. Gelora Aksara Pratama; Edisi Ketiga, 2004), h. 30.

2. Penyajian Data (Display Data)

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.⁶⁸

3. Verifikasi Data

Kesimpulan atau verifikasi data adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarik kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

⁶⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 123.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Puskesmas Palakka Kab. Barru. Terkait dengan Penerapan PSAK 23 tentang Imbalan Jasa Karyawan di Puskesmas Palakka Kab. Barru dianalisis dengan Akuntansi Syariah. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara kepada kepala Puskesmas Palakka dan karyawan Puskesmas Palakka Kab. Barru. Adapun ulasan tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis lebih satu bulan terdapat berbagai informasi mengenai tentang mekanisme penghitungan imbalan jasa karyawan di puskesmas Palakka di analisis akuntansi syariah, Bentuk imbalan jasa karyawan di puskesmas Palakka dianalisis akuntansi syariah dan faktor – faktor perbedaan imbalan jasa karya puskesmas Palakka dianalisis akuntansi syariah.

A. Mekanisme penghitungan Imbalan Jasa karyawan di Puskesmas Palakka di analisis Akuntansi Syariah.

Puskesmas Palakka adalah puskesmas seperti halnya puskesmas-puskesmas lainnya yang memberikan pelayanan kesehatan bagi setiap pasien atau konsumen yang dilayaninya, dalam hal ini puskesmas palakka kabupaten Barru memiliki wadah pemeriksaan kesehatan diluar dari puskesmas Palakka. Dalam puskesmas memiliki pembagian atau mekanisme penghitungan Imbalan Jasa Karyawan yang mengikuti aturan- aturan pemerintah.

Mekanisme penghitungan adalah salah satu hal pokok dalam penentuan pemberian imbalan jasa pada karyawan Puskesmas Palakka sehingga

adanya mekanisme tersebut pembagian imbalan jasa bisa diterima setiap karyawannya dengan aturan tersebut.

Mekanisme yang dimaksud tersebut dalam wawancara H. Takbir Jafar selaku Kepala Puskesmas Palakka Kab. Barru Bahwa :

“Kalau mekanisme penghitungannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu 60 % untuk sarana dan 40% untuk pelayanan jasa. Dan yang dimaksud disini apa itu sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan seperti alat dan media sedangkan 40 % itulah yang dibagikan kepada karyawan di Puskesmas Palakka mekanismenya lagi dalam pembagian hal tersebut berbeda beda dalam artian tidak sama dalam setiap karyawan karena mekanisme pembagian itu dibedakan karena golongan, tingkat pendidikan dan banyaknya yang dilayani”⁶⁹

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa mekanisme penghitungan imbalan jasa karyawan itu mengikuti aturan – aturan yang telah dikeluarkan pemerintah seperti golongan dan tingkat pendidikan sehingga diterapkannya di Puskesmas Palakka. Adapun Mekanisme penghitungan imbalan jasa karyawan di Puskesmas Palakka itu sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan secara internal dan eksternal yang di ungkapkan oleh Hj. Suharmawati selaku karyawan Puskesmas Palakka mengatakan bahwa :

“ Kalau Internal itu dek Pekerjaan Puskesmas yang berhubungan dari dalam seperti pelayanan jasa PAD, Kapitasi dan Non Kapitasi Sedangkan Eksternal adalah Pekerjaan Puskesmas yang berhubungan luar seperti dinas keluar untuk melaksanakan tugas tambahan seperti posyandu dan program masyarakat sehat di desa sepatoga”⁷⁰.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa mekanisme penghitungan itu ada dua faktor terjadinya mekanisme penghitungan yaitu internal dan eksternal.

⁶⁹ H.Takbir jafar, kepala Puskesmas, wawancara di Puskesmas Palakka Tanggal 06 november 2022

⁷⁰ H. suharmawati, pns, wawancara di Puskesmas Palakka tanggal 06 november 2022

MEKANISME PEMBAGIAN IMBALAN JASA SESUAI DENGAN GOLONGAN, JABATAN, DAN PENDIDIKAN

(Sumber data dari Puskesmas Palakka Kabupaten Barru)

NO	NAMA	JMLH YG DI TERIMA NOV	PPH 21	YG DIBAYARKAN
1	H. TAKBIR JAFAR SKM S.Kep	Rp 2,608,997	Rp 391,350	Rp 2,217,647
2	HJ.SUHARMAWATI.S.ST	Rp 2,021,973	Rp 101,099	Rp 1,920,874
3	HJ.HASBIANA, S.ST	Rp 1,369,723	Rp 205,458	Rp 1,164,265
4	H.M.IRWAN.S.KEP.NS.M.KES	Rp 1,630,623	Rp 244,593	Rp 1,386,030
5	ANDI NURAENI,S.KEP.Ns	Rp 1,379,758	Rp 68,988	Rp 1,310,770
6	LUSMA,S.KEP Ns	Rp 1,630,623	Rp 81,531	Rp 1,549,092
7	ASRIANY. S.Tr.Keb	Rp 903,114	Rp 45,156	Rp 857,959
8	Muhayyir Abbas AMd.Farm	Rp 847,924	Rp -	Rp 847,924
9	Hj. MURLIA,S.KEP NS	Rp 1,379,758	Rp 68,988	Rp 1,310,770
10	SUBAEDAHA,AMK	Rp 913,149	Rp 45,657	Rp 867,491
11	AMIRUDDIN,AMKG	Rp 1,043,599	Rp 52,180	Rp 991,419
12	ANDI HALIFAH.S.Farm	Rp 1,174,049	Rp 58,702	Rp 1,115,346
13	IKA DAULIKA A.Md.Keb	Rp 847,924	Rp -	Rp 847,924
14	HJ.DARMAWATI, AMd.KEB	Rp 978,374	Rp 48,919	Rp 929,455
15	ST.ROMA AMd.KEB	Rp 913,149	Rp 45,657	Rp 867,491
16	MAHUSENG AMd Kep	Rp 1,108,824	Rp 55,441	Rp 1,053,382
17	HJ.NURJANNAH,SKM.M,Kes	Rp 1,174,049	Rp 58,702	Rp 1,115,346

18	ARMIN ARIF R,SKM	Rp 948,270	Rp 47,413	Rp 900,856
19	ULFY DWI TALMI,SKM M.Adm Kes	Rp 702,422	Rp 35,121	Rp 667,301
20	Hj. HAERINA A.Md.AK	Rp 1,384,775	Rp -	Rp 1,384,775
21	MARIALAM, S.Kep	Rp 1,239,273	Rp 61,964	Rp 1,177,310
22	SURNIAH, SKM	Rp 1,108,824	Rp 55,441	Rp 1,053,382
23	YAYU SRIANTI A.Md.Keb	Rp 847,924	Rp -	Rp 847,924
24	HASMINI S.Tr.Keb	Rp 1,108,824	Rp 55,441	Rp 1,053,382
25	SUNARTI S.Kep Ns	Rp 1,369,723	Rp 68,486	Rp 1,301,237
26	Dr. KHAERUNNISA	Rp 1,944,204	Rp -	Rp 1,944,204
27	Dr. REZKI PURWASARI	Rp 2,021,973	Rp 101,099	Rp 1,920,874
TOTAL		Rp 34,601,820	Rp 1,997,388	Rp 32,604,432



MEKANISME PEMBAGIAN IMBALAN JASA PAD

(Sumber data dari Puskesmas Palakka Kabupaten Barru)

NO	NAMA	TAHUN 2021	TAHUN2022	TOTAL
1	MEDIS 20 %	Rp 117,000	Rp 289,000	Rp 406,000
2	PARAMEDIS 53 %	Rp 310,050	Rp 765,850	Rp 1,075,900
3	NON PARAMEDIS 5%	Rp 29,250	Rp 72,250	Rp 101,500
4	MANAJEMEN 22 %	Rp 128,700	Rp 317,900	Rp 446,600
	JUMLAH	Rp 585,000	Rp 1,445,000	Rp 2,030,000

MEKANISME PENGHITUNGA PADA JASA KAPITASI
(Sumber data dari Puskesmas Palakka Kabupaten Barru)

NO	NAMA	JABATAN PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH YANG DITERIMA
1	2	3	4	5
1	IRMA SURIANI MARALA, AMK	D3 KEPERAWATAN	MAGANG	Rp 81,410
2	Ns, SALMIDA SADIK, S. Kep	S1 KEPERAWATAN NERS	MAGANG	Rp 126,638
3	MULIANI, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	MAGANG	Rp 153,775
4	MASTANG, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	MAGANG	Rp 171,866
5	MASNAENI, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	MAGANG	Rp 9,046
6	Hj. AMALIA ZAINUDDIN, SKM	S1 KESMAS (PROMKES)	MAGANG	Rp 54,274
7	NUR ASMAYANI, Amd.Kep	D3 KEPERAWATAN	MAGANG	Rp -
8	FARIDA HIDAYATI, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	MAGANG	Rp 135,684
9	MIRDANAWATI, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	MAGANG	Rp 81,410
10	HAJRAH, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	MAGANG	Rp 135,684
11	HARIATI, S. Farm	S1 FARMASI	MAGANG	Rp 54,274
12	JUMIYATI SYAM, SKM	S1 KESMAS (PROMKES)	MAGANG	Rp 617,884

13	FARIDA, S. Farm	S1 FARMASI	MAGANG	Rp -
14	MEGA MUSTIKA, S.Kep, Ns	S1 KEPERAWATAN NERS	MAGANG	Rp 54,274
15	IRMAWATI, S.Kep, Ns	S1 KEPERAWATAN NERS	MAGANG	Rp 90,456
16	SRI MURTI PATMAYANTI, S.Kep, Ns	S1 KEPERAWATAN NERS	MAGANG	Rp -
17	NURAENI, S.Kep, Ns	D3 KEPERAWATAN	MAGANG	Rp 117,593
18	ENDANG ULFA, Amd. Keb	D3 KEBIDANAN	MAGANG	Rp -
19	MUSFIDA RAHAYU, Amd. Kep	D3 KEPERAWATAN	MAGANG	Rp -
20	HASNIAR, Amd. Kes	D3 KEPERAWAN GIGI	MAGANG	Rp 208,049
21	RATNA, S.Kep, Ns	S1 KEPERAWATAN NERS	MAGANG	Rp 180,912
22	SRI WAHYUNI ADAM, S.Kep, Ns	S1 KEPERAWATAN NERS	MAGANG	Rp 180,912
23	RATNAH, A,Md.Kep	D3 KEPERAWATAN	MAGANG	Rp 126,638
24	SAM SAM, AMK	D3 KEPERAWATAN	MAGANG	Rp -
25	EMMA RAMDHANI,S.ST	D4 KEBIDANAN	MAGANG	Rp 90,456
26	HASMAWATI,S.Kep.Ns	S1	MAGANG	Rp

		KEPERAWATAN NERS		36,182
27	NURLINDA A.Md.Keb	KEBIDANANA	MAGANG	Rp 180,912
28	JUSMAN	SMA/SOPIR	KONTRAK DAERAH	Rp 66,798
29	NERJA PRAJAYA	SMA/SOPIR	KONTRAK DAERAH	Rp 53,439
30	NURBUAH, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	KONTRAK DAERAH	Rp 44,532
31	SULFIANA TAMRIN, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	KONTRAK DAERAH	Rp 53,439
32	FITRIANI JAFAR, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	KONTRAK DAERAH	Rp 44,532
33	HASNIATI, Amd.Kep	D3 KEPERAWATAN	KONTRAK DAERAH	Rp 20,039
34	NURAFDALIA, Amd.Kep	D3 KEPERAWATAN	KONTRAK DAERAH	Rp 22,266
35	MULIANA L, Amd.Kep	D3 KEPERAWATAN	KONTRAK DAERAH	Rp 22,266
36	FITRI WAHDANIYAH, A. Md.KI	D3 KESLING	KONTRAK DAERAH	Rp 44,532
37	ASTRIYANI, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	KONTRAK DAERAH	Rp 40,079
38	NIRMAWATI, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	KONTRAK DAERAH	Rp 33,399
39	DAHRIAWATI, A. Md. Gz	D3 GIZI	KONTRAK DAERAH	Rp 44,532
40	DEWI KUMALASARI, SKM	S1 KESMAS KESKER	KONTRAK DAERAH	Rp 44,532
41	ASRI	SMA/SATFAM	KONTRAK DAERAH	Rp 53,439
42	ZULFIKAR SATTAR	SMA/SATFAM	KONTRAK	Rp

			DAERAH	53,439
43	EMI ASTUTI, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	KONTRAK DAERAH	Rp 24,493
44	AYU ASHARI, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	KONTRAK DAERAH	Rp 35,626
45	IRWANTO, SKM/ SHELA	OPERATOR	KONTRAK DAERAH	Rp 44,532
46	SUNARFIANA, SE	PENGELOLA KEUANGAN	KONTRAK DAERAH	Rp 2,227
47	AGUS EFENDY, SKM	EPIDEMIOLOGI	KONTRAK DAERAH	Rp 48,985
Jumlah				Rp 3,685,456



MEKANISME PENGHITUNGAN NON KAPITASI

(Sumber data dari Puskesmas Palakka Kabupaten Barru)

NO	Nama Petugas	Gol.	%	JUMLAH JASA PELAYANAN (Rp)	PPH 21 5%	JUMLAH JASA DITERIMA (Rp)
1	2	4	5	6	7	8
MEDIS			30			
1	dr. Resky Purwasari	III	15	Rp 1,328,269.50	Rp 66,413.48	Rp 1,261,856.03
2	dr. Khaerunnisa		15	Rp 1,328,269.50		Rp 1,328,269.50
PARAMEDIS			55			
1	Lusma, S.Kep. Ns	III	11	Rp 974,064.30	Rp 48,703.22	Rp 925,361.09
2	Andi Nuraeni,S.Kep. Ns	III	11	Rp 974,064.30	Rp 48,703.22	Rp 925,361.09
3	Subaedah, AMK	III	11	Rp 974,064.30	Rp 48,703.22	Rp 925,361.09
4	Hj. Murlia,S.Kep.Ns	III	11	Rp 974,064.30	Rp 48,703.22	Rp 925,361.09
5	Marialam, S.Kep.Ns	III	11	Rp 974,064.30	Rp 48,703.22	Rp 925,361.09
MANAJEMEN			15			
1	H. Takbir Jafar,SKM.S.Kep (Kepala Puskesmas)	IV	8	Rp 708,410.40	Rp 106,261.56	Rp 602,148.84

2	Ulfy Dwi Talmi,SKM (Admin)	III	2	Rp 177,102.60	Rp 8,855.13	Rp 168,247.47
3	Hj. Haerina, Amd. AK (Bendahara)	II	5	Rp 442,756.50	Rp -	Rp 442,756.50
Jumlah total			100	Rp 8,855,130.00	Rp 425,046.24	Rp 8,430,083.76

Analisis Akuntansi Syariah terhadap mekanisme penghitungan imbalan jasa karyawan di Puskesmas Palakka Kab. Barru.

Mekanisme penghitungan imbalan jasa pada setiap karyawan. Prinsip Akuntansi Syariah yang terdapat didalamnya adalah keadilan. Hal ini Puskesmas Palakka memberikan imbalan jasa pada karyawan sesuai dengan aturan – aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan adil secara pandangan dunia. Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah sendiri memiliki 2 pengertian. Pertama, prinsip keadilan yang berkaitan dengan praktek moral, yakni kejujuran. Kejujuran ini sangat penting supaya informasi akuntansi yang disajikan tidak menyesatkan. Kedua, prinsip keadilan berasal dari kata adil yang bersifat fundamental dan berpijak pada nilai-nilai syariah serta moral. Artinya, keadilan ini menjadi pendorong semangat kerja.⁷¹

Pada hakikatnya adalah pemberlakuan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah yang adil mengacu pada prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang sehingga karyawan tidak merasa tertindas dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Kepala Puskesmas Palakka.

⁷¹ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002). h. 11

“Kami memberikan hak setiap karyawan sesuai dengan aturan – aturan tentang pembagian imbalan jasa pada setiap karyawan dan transparan sehingga tidak ada yang merasa di sembunyikan pada mekanisme pembagian imbalan jasa tersebut”.

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa mekanisme pembagian imbalan jasa karyawan sangat adil dalam mengikuti aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antara yang tinggi jabatan sama yang rendah jabatan karena porsinya atau haknya yang diberikan dapat diterima dengan adil.

Berdasarkan pada penerapan prinsip keadilan tersebut, sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah An-Nahl {16} ayat 90 yang berbunyi;

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾⁹⁰

Terjemahnya:

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl {16} ayat 90).⁷²

Maksud dari Ayat tersebut adalah ada beberapa hal yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-Nya agar diamalkan sebagai wujud ketaatan dan ketakwaan kepada-Nya.

⁷² Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur’an, 2009), h.

B. Penerapan PSAK No.23 tentang imbalan jasa karyawan di Puskesmas Palakka di Analisis Akuntansi Syariah.

Berdasarkan pengamatan lapangan yang peneliti lakukan bahwasanya, jasa karyawan itu sangat penting bagi karyawan Puskesmas Palakka untuk membangun semangat kerja dalam melayani pasien.

Jasa adalah suatu unit bisnis yang kegiatannya menghasilkan produk (jasa) tidak berwujud. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan.⁷³ Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya. Jasa juga adalah sesuatu perbuatan yang baik atau berguna untuk orang lain, negara dan instansi, seperti wawancara dengan Andi Halifah selaku bendahara Puskesmas palakka.

“Jadi jasa itu pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan Puskesmas palakka yang memiliki upah maksud dari upah yang saya maksud bukan gaji melainkan jasanya dibayar seperti pelayanannya kepada pasien yang dilayaninya. Jasa yang ada di Puskesmas ini itu ada tiga jasa”.⁷⁴

Mendengar apa yang disampaikan Bendahara tersebut dan dibetulkan juga oleh kapus (kepala Puskesmas) yaitu Bapak Takbir jafar

“Kalau jasa itu yang ada di Puskesmas Palakka ini itu memang ada tiga bagian yang pertama itu Pendapatan Asli Daerah, jasa yang kedua itu kapitasi dan yang terakhir non kapitasi”.⁷⁵

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa Puskesmas Palakka memiliki jasa dan jasa itu adalah upah dan bukan gaji . Jasa itu terbagi tiga yang ada di Puskesmas palakka yaitu PAD, Kapitasi dan Non kapitasi.

⁷³ Sotarduga Sihombing dkk, Dasar – dasar Akuntansi, (Widina Bhakti persada Bandung 2022), h.10.

⁷⁴ Andi Halifa, Bendahara, wawancara di Puskesmas Palakka tanggal 06 november 2022.

⁷⁵ H.Takbir jafar, kepala Puskesmas, wawancara di Puskesmas Palakka Tanggal 06 november 2022

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah hasil retribusi dari daerah, dan semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pada periode tertentu di daerah tersebut yang bertujuan untuk memberikan keluleuasaan kepada pendanaan dalam mengelola daerah itu sendiri(otonomi daerah).

Hal yang diungkapkan tentang penerapan PSAK No. 23 pada PAD oleh Andi Halifa selaku bendahara PAD Puskesmas Palakka mengatakan bahwa :

“ Kalau Pendapatan Asli Daerah atau disingkat PAD, adalah Penerimaan dari sumber – sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang – undang yang berlaku. Terdiri dari Pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, retribusi jasa umum lain- lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah, Penerimaan jasa giro dan pendapatan dari pengembalian”.⁷⁶

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa Pendapatan Asli Daerah itu penerimaan dari sumber tertentu dan mengikuti landasan aturan yang ada di undang – undang yang berlaku.

2. Kapitasi

Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Penerapan PSAK No. 23 pada Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

⁷⁶ Andi Halifa, Bendahara, wawancara di Puskesmas Palakka tanggal 06 november 2022.

Kesehatan. Pengaturan penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik pemerintah daerah ditujukan bagi FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Dan pemanfaatan dana kapitasi itu sebagai berikut:

1. Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
2. Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan dan belanja FKTP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi
4. Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud jdih.kemkes.go.id - 6 - pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

5. Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala daerah atas usulan kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesehatan pada kabupaten/kota dengan mempertimbangkan:
 - a. tunjangan yang telah diterima dari pemerintah daerah.
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja dibidang pelayanan kesehatan.
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
6. Format keputusan kepala daerah mengenai penetapan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan jdih.kemkes.go.id - 7 - kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Calon PNS.
 - b. PNS.
 - c. PPPK.
 - d. Peserta program internsip.

- e. Peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Pegawai non PNS yang dipekerjakan oleh kepala dinas kesehatan selaku pemberi kerja dalam hal PNS dan PPPK tidak memadai, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel.

- a. ketenagaan dan/atau jabatan.
- b. kehadiran.

Pasal 6

- (1) Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. jenis ketenagaan
 - b. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan.
 - c. masa kerja.
- (2) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh).
 - b. tenaga medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima) jdih.kemkes.go.id - 8 –
 - c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus).

- d. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh).
 - e. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh).
 - f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - g. tenaga nonkesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh).
 - h. tenaga nonkesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh); i. tenaga nonkesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan j. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya.
- (3) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
- (4) Variabel rangkap tugas jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
- a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP.
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN, kepala tata usaha, atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.

3. Non kapitasi

Penerapan PSAK No. 23 pada Alokasi Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk jasa rawat inap sebagai berikut :
 - a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 60 persen terdiri dari :
 - 1). Dokter Umum sebesar 30 %
 - 2). Paramedis dan non medis sebesar 55 %
 - 3). Manajemen Puskesmas sebesar 15 %
 - 4). Jasa pelayanan untuk dokter umum dapat diberikan ke paramedis dan non paramedis apabila tidak memiliki dokter umum.
 - b. Biaya operasional pelayanan sebesar 40%
2. Untuk jasa persalinan pervagina normal, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar, penagnana pasca keguguran, pelayanan tindakan pask a persalinan, pelayanan pra rujukan dan pelayanan komplikasi pasca persalinan sebagai berikut:
 - a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 60 % terdiri dari :
 - 1). Penolong persalinan sebesar 80 %
 - 2). Dokter umum sebesar 10 %
 - 3). Manajemen puskesmas sebesar 10 %
 - 4). Jasa pelayanan dokter umum dapat diberikan kepenolong persalinan apabila Puskesmas tidaak memiliki dokter umum.
 - b. Biaya operasional sebesar 40 %

3. Untuk jasa antenatal Care (ANC), Postnata Care (PNC) dan pelayanan KB sebagai berikut :
 - a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 60 % terdiri dari :
 - 1). Bidan sebesar 80 %.
 - 2). Manajemen Puskesmas sebesar 15 % .
 - b. Biaya operasional pelayanan sebesar 40 %
4. Untuk Protesa gigi Sebagai berikut :
 - a. Jasa – jasa pelayanan kesehatan sebesar 60 % terdiri dari :
 - 1). Dokter gigi dan perawat gigi sebesar 90%
 - 2). Manajemen Puskesmas sebesar 10%
 - b. Biaya operasional sebesar 40%
5. Jasa peayanan rujukan Ambulance sebagai berikut :
 - a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 60 % terdiri dari :
 - 1). Supir sebesar 45 %
 - 2). Petugas yang merujuk sebesar 45%
 - 3). Manajemen Puskesmas sebesar 10 %
 - b. Biaya operasional pelayanan sebesar 40%

Biaya operasional pelayanan sebagaimana dimaksud diatas adalah dana untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas termasuk obat, alat kesehatan dan bahan media habis pakai.

Kapitasi dan Non kapitasi juga diungkapkan oleh Hj. Haerina selaku Bendahara Puskesmas palakka mengatakan bahwa :

“ Kapitasi itu dan non kapitasi memiliki perbedaan kalau Kapitasi itu dek Jasa yang dilakukan oleh karyawan yang setiap bulannya mendapatkan jasanya atau hasil dari jasanya sedangkan kalau non kapitasi itu dek jasa

yang tidak seperti kapitasi kalau non kapitasi tidak selalau ada pekerjaan jasa setiap bulannya di Puskesmas Palakka bisa dikatakan jasa non kapitasi ini tidak menentu sedangkan kapitasi itu menentu dalam setiap bualnnya”.⁷⁷

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa jasa Kapitasi dan Non kapitasi adalah bagian dari imbalan jasa yang ada di Puskesmas pallaka dan memiliki perbedaan diantara keduanya. Kapitasi memiliki imbalan jasa yang menentu sedangkan non kapitasi sebaliknya atau tidak menentu.

Analisis akuntansi syariah terhadap jasa karyawan di Puskesmas Palakka.

Akuntansi syariah memiliki prinsip pertanggungjawaban sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-Qur’an. Maksudnya setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dalam budaya kita, umumnya tanggungjawab diartikan sebagai keharusan untuk menanggung dan menjawab dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan.

Penerapan konsep pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah adalah penyusunan laporan keuangan oleh pelaku bisnis atau individu yang terlibat dalam praktik bisnis sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada amanah atas pihak – pihak yang terkait.⁷⁸

Berdasarkan pada prinsip pertanggungjawaban tersebut, Allah Berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al-Muddaththir {74} ayat 38 yang berbunyi

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۗ ٣٨

⁷⁷ Hj. Haerina, Bendahara, wawancara di Puskesmas Palakka tanggal 06 November 2022.

⁷⁸ Muhammad Wahyuddin Abdullah, “Akuntansi Syariah “, h.132.

Tejemahnya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.
(Q.S. Al-Muddaththir {74} ayat 38).⁷⁹

C. Menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi perbedaan imbalan jasa karyawan di Puskesmas Palakka dianalisis akuntansi syariah.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti lakukan di lapangan bahwasanya, faktor – faktor perbedaan imbalan jasa itu ada beberapa point di Puskesmas Palakka.

1. Pendidikan

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia dalam melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya

2. Kehadiran

Kehadiran adalah hal yang menjadikan perbedaan dalam imbalan jasa karyawan di Puskesmas Palakka pada setiap karyawan yang melakukan pekerjaan atau melayani konsumen.

⁷⁹ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h. 576

3. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Tanggungjawab selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khalik mulai dari alam kandungan.⁸⁰

Analisis dengan akuntansi syariah terhadap faktor – faktor perbedaan imbalan jasa karyawan.

Sistem islam selalu mengarah kepada tercapainya kebaikan dan kesejahteraan. Keutamaan serta penghapusan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh makhluk hidup. Pada bidang ekonomi sistem islam mengarah ketercapainya keselamatan dunia dan akhirat.

Dalam faktor – faktor perbedaannya imbalan jasa karyawan di Puskesmas Palakka Kab. Barru perlu dikaitkan dengan prinsip- prinsip Akuntansi syariah. Dalam al-Quran Al-Baqarah ayat 282 ada tiga yang menjadi nilai prinsipdasar dalam akuntansi syariah adalah pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran.

1. Pertanggung jawaban

Dalam kebudayaan kita “Tanggung jawab” diartikan sebagai keseharusan untuk “menanggung” dan “Menjawab” dalam pengertian lain yaitu suatu keseharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan dengan amanah.⁸¹

⁸⁰ Muammar Khaddafi dkk, “Akuntansi syariah”, h. 17.

⁸¹ Muhammad, “Pengantar Akuntansi Syariah” (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h.11.

Dalam Akuntansi syariah merupakan konsep selalu berkaitan dengan konsep amanah. Banyak ayat Al – Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah dimuka bumi ini.⁸²

Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan kak ulfi sela ku karyawan di puskesmas Palakka kab.Barru mengatakan bahwa :

“ Mengenai faktor – faktor perbedaan imbalan jasa pada setiap karyawan itu salah satunya tentang tanggung jawab maka dari itu kita harus mempertanggung jawabkannya sebagaimana itu tugas kami sebagai karyawan dengan cara yang baik sesuai dengan arti tanggung jawab yang absolut seperti contohnya pak kapus (kepala puskesmas) itu memiliki banyak tanggung jawab daripada bendahara jadi bisa dikatakan tanggung jawabnya kapus lebih banyak maka dari situ bisa kita simpulkan disitulah salah satu letak perbedaan imbalan jasanya”.⁸³

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa Dari wawancara tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya sudah menerapkan salah satu bagian dari perinsip akuntansi syariah yaitu tanggung jawab.

Hanniffa menjabarkan bahwa dalam aspek Pertanggungjawabkan meliputi.⁸⁴

1. Pertanggungjawaban bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah swt.
2. Berusa memberikan pelayanan yang terbaik selaku pemegang amanah.

⁸² Zulkifli dan sulastiningsih, *Kerangka konseptual Pelaporan Keuangan dalam Presefktid Islam, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 2 no. 2 Desember: 1998, hal 176.

⁸³ Ulfy, karyawan puskesmas palakka, wawancara di puskesmas palakka tanggal 07 november 2022.

⁸⁴ Soyan, Harahap, *Teori Akuntansi, Edisi revisi*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), h. 224.

3. Meyakini bahwa tujuan hidup adalah sebagai Khalifah diatas dunia dan bertanggungjawab.
4. Bekerja sebagai Amal ibadah sebagai dasar mencapai ibadah dunia dan Akhirat.

Berdasarkan pada prinsip pertanggungjawaban tersebut, Allah Berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Muddaththir {74} ayat 38 yang berbunyi

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝ ٣٨

Tejemahnya:

38. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (Q.S. Al-Muddaththir {74} ayat 38).⁸⁵

2. Keadilan

Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah sendiri memiliki 2 pengertian. Pertama, prinsip keadilan yang berkaitan dengan praktek moral, yakni kejujuran. Kejujuran ini sangat penting supaya informasi akuntansi yang disajikan tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, prinsip keadilan berasal dari kata adil yang bersifat fundamental dan berpijak pada nilai-nilai syariah serta moral. Artinya, keadilan ini menjadi pendorong untuk melakukan upaya dekonstruksi terhadap pembangunan akuntansi modern menjadi akuntansi alternatif yang lebih baik.⁸⁶

Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas. Islam tidak bermaksud untuk

⁸⁵ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h.

⁸⁶ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002). h. 11

menghancurkan kebebasan individu untuk mengontrolnya demi kepentingan masyarakat individu itu sendiri, dan kepentingannya juga melindungi kepentingan yang sah. Hukum Memaknai dengan perannya dalam mendamaikan pribadi karyawan dan bukan sebaliknya. Ini mengakhiri perselisihan dan memenuhi tuntutan keadilan karena itu berlaku adil berarti hidup menurut prinsip – prinsip Islam.⁸⁷

Pada hakikatnya adalah pemberlakuan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Sehingga tidak ada kecemburuan sosial terhadap satu sama sama lainnya. Hal ini sesuai dengan wawancara kak Ulfi selaku karyawan di Puskesmas Palakka mengatakan bahwa :

“Konsep keadilan sudah lama diterapkan di Puskesmas Palakka demi menjaga kecurangan – kecurangan yang akan terjadi sehingga terciptanya kedamaian satu sama lainnya terhadap karyawan seperti kita tidak mungkin memberikan imbalan yang sama pada karyawan yang malas sama yang rajin pasti berbeda”.

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa konsep keadilan sudah lama diterapkan karna menghindari konflik anantara satu dengan yang lainnya atau kecurangan setiap individu karna porsinya sudah tertakar.

Berdasarkan pada penerapan prinsip keadilan tersebut, sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah An-Nahl {16} ayat 90 yang berbunyi;

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ ٩٠﴾

Terjemahnya:

⁸⁷ Friedmann. Teori hukum. Edisi lima. London 1967. h. 517 – 518.

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl {16} ayat 90).⁸⁸

3. Kebenaran

Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan.⁸⁹

Kebenaran dalam Akuntansi Syariah adalah kesesuaian antara yang dicatat dan penyesuain antara apa yang terjadi dilapangan, termasuk termasuk didalamnya rinsi kebenaran yang menyangkut engukuran kebudayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, laba perusahaan dan laporan keuangan sehingga seorang akuntan dalam raktiknya dapat mengukur semuanya secara tanggungjawab, adil dan benar berdasarkan yang ada dalam entitas. Termasuk dalam prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, laba perusahaan dan laporan keuangan sehingga seorang akuntan dalam praktek wajib mengukur semuanya secara tanggungjawab, benar dan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam sebuah perganisasi tersebut.⁹⁰ Dalam penerapan prinsip kebenaran tidak lepas dari prinsip pertanggungjawaban dan keadilan karena untuk mengukur kebenaran maka melalui pengukuran pertanggungjawaban dan keadilan sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Al-Anfal {8} ayat 27 yang berbunyi :

⁸⁸ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h. 277

⁸⁹ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002). h. 11

⁹⁰ Muhammad Wahyuddin Abdullah, "*Akuntansi Syariah* ", h.132.

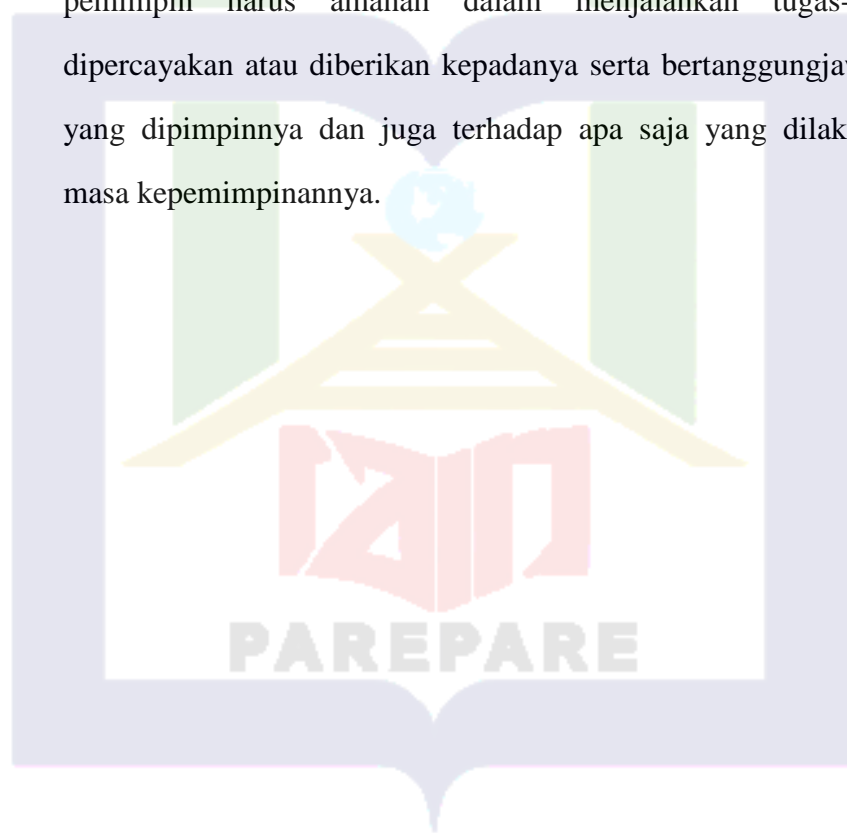
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ۚ ٢٧

Terjemahnya:

“27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S.Al-Anfal{8} ayat 27)”⁹¹.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus bersikap jujur dan tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul-nya dan pemimpin harus amanah dalam menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan atau diberikan kepadanya serta bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya dan juga terhadap apa saja yang dilakukan selama masa kepemimpinannya.



⁹¹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h. 180

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan PSAK 23 tentang imbalan jasa karyawan di Puskesmas Palakka kab. Barru. Maka ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penghitungan imbalan jasa di Puskesmas Palakka memiliki mekanisme pengitungan 40 persen untuk sarana dan 60 persen untuk pelayanan jasa. Penghitungan yang terdapat didalamnya diikuti oleh aturan – aturan yang berlaku atau yang dikeluarkan pemerintah sehingga memiliki kesan yang baik, yang dalam Akuntansi syariah merupakan penjabaran dari prinsip keadilan.
2. Bentuk penerapan PSAK No. 23 pada imbalan jasa karyawan itu sesuai dengan PSAK No. 23 dan mengikuti pendapatan yang dikeluarkannya pada point – point yang berlaku pada setiap jasa yang ada tiga yaitu PAD, Kapitasi dan Non kapitasi. Dalam Akuntansi Syariah merupakan penjabaran dari Prinsip Pertanggungjawaban.
3. Faktor – faktor yang membedakan imbalan jasa sudah sangat baik yang diterapkannya dan mengikuti sumber aturan – aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian jasanya .Hal ini sesuai dengan prinsip Akuntansi syariah, yakni prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

B. Saran

Berikut ini saran yang diajukan peneliti berdasarkan hasil penelitian :

1. Dalam penetapan Imbalan jasa karyawan harus tetap sesuai aturan yang berlaku sehingga imbalan jasa yang diterima tetap adil dalam sistem pembagiannya.
2. Hasil penelitian ini sekiranya dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan seperlunya.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al- Karim

- Abdi, Husnul. 2021. *Pengertian Akuntansi Menurut Para Ahli*. <https://hot.liputan6.com>. (diakses pada tanggal 27 Februari 2022)
- Afandi, Joni. 2018. *Pengakuan Pendapatan menurut SAK dan Pengakuan Pendapatan menurut SAP*. <https://www.ksap.org/sap/pengakuan-pendapatan-menurut-sak-dan-pengakuan-pendapatan-menurut-sap/>. (diakses pada tanggal 1 Maret 2022).
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bastian, Indra. 2008. *Akuntansi Kesehatan*. Yogyakarta: PT Glora Aksara Pratama.
- Beribe, Anna Ina Wae & Jullie J. Sondakh. 2020. *Analisis penerapan PSAK 23 tentang pendapatan jasa pasien Jaminan Kesehatan (JKN) menurut Standar Akuntansi Keuangan terhadap tarif Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon*. dalam INDONESIA ACCOUNTING JOURNAL Volume 2, NUMBER 1.
- Burhan, Windy Ira Sari. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamanuri, Aji. 2010. *Metode penelitian muamalah*. Ponorogo: Stain po press
- Febrianty, Riska. 2016. *Pengertian Laporan Keuangan*. <http://eprints.uny.ac.id/9020/3>, (diakses pada tanggal 1 Maret 2022).
- Hasanah, Nur. 2019. *Evaluasi Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Pendapatan Berdasar PSAK 23 pada PT. ANGKASA PURA II (PERSERO)*. dalam Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya Vol. 4, No. 1.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dalam Dinamika Ekonomi Pesisir* (Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2009).
- Kementrian Agama RI Alquran dan terjemahan, (Bandung syamil quran, 2009)
- Mulyadi. 2010. *Evaluasi Pendidikan*. Malang: UIN Maliki Press. Cetakan Pertama.
- Muammar Khaddafi dkk. *Akuntansi syariah*. Medan: Penerbit Madenatera, 2016.
- Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Putri, Rahma. 2020. *Analisis Penerapan Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan*. dalam Skripsi Program

Studi Akuntansi , Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Rizky, Muhammad. 2020. *Akuntansi Keuangan Menurut Para Ahli*. <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/>. (Diakses pada tanggal 1 Maret 2022).
- Rahnadani, Rubiah. 2021. *Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan berdasarkan PSAK No. 23 pada PT. Fauzi Haya Tour & Travel*. dalam skripsi program studi akuntansi syariah, Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Sumateraa Utara.
- Seputar Pengetahuan. 2013. *Kompensasi Menurut Para Ahli*. <https://www.seputarpengetahuan.co.id>, (diakses pada tanggal 2 Maret 2022)
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Spiegel, Murarry R., Larry J. Stephens. 2004. *Statistick*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyanto, Bagong & Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial: Berbagi Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Sotarduga Sihombing dkk, *Dasar – dasar Akuntansi*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Tim penyusun.2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara press.
- Triartra, Muhammad edo. 2021. *Analisi Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Serta Pengakuan Beban Berdasarkan PSAK No. 23 Pada PT. Semen Batugraja (PERSERO) TBK Palembang Periode 2018 – 2020''*. dalam Skripsi Program Studi Akuntansi, Palembang, Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti.
- Wiranata, Rizky. 2017. *Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan dan Beban Serta Pelaporan Keuangan Pada CV Cahaya Abadi Palembang*. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Yusuf, Burhanuddin. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada



	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p align="center">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : YUSRIANDI
 NIM : 18.62202.052
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
 JUDUL : PENERAPAN PSAK 23 TENTANG PENDAPATAN
 KARYAWAN DI PUSKESMAS PALAKKA KAB.
 BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepala Puskesmas Palakka kabupaten Barru

1. Bagaimana penghitungan Imbalan Jasa yang di terima Karyawan di Puskesmas Palakka?
2. Apakah ada perbedaan Imbalan Jasa pada setiap karyawan di Puskesmas Palakka?
3. Apakah ada bentuk lain selain uang dari Imbalan Jasa?
4. Apakah ada perbedaan Imbalan jasa dari pegawai Puskesmas yang keluar Dinas?
5. Bagaimana penetapan Imbalan Jasa pada setiap karyawan honor Di Puskesmas Palakka?
6. Bagaimana respon karyawan atas imbalan jasa yang diberikan sebelum – sebelumnya?

7. Apakah ada penetapan waktu dalam memberikan imbalan jasa pada karyawan puskesmas Palakka?



SURAT PERMOHONAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5492/In.39.8/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di

KABUPATEN BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : YUSRIANDI
Tempat/ Tgl. Lahir : BARANG, 03 JUNI 1999
NIM : 18.62202.052
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : BARANG, KELURAHAN TOMPO, KECAMATAN BARRU,
KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENERAPAN PSAK 23 TENTANG IMBALAN JASA KARYAWANDI PUSKESMAS
PALAKKA KABUPATEN BARRU**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 22 November 2022
Dekan,



Muztalifah Muhammadun

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAHAN KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmpstpk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 24 November 2022

Nomor : 578/IP/DPMPSTP/XI/2022
 Lampiran : *
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
 Yth. UPT Puskesmas Palakka Kab. Barru
 Di -
 Tempat

Berdasarkan Surat dari Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare Nomor : B.5492/In.39.8/PP.00.9/11/2022 tanggal 22 November 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : YUSRIANDI
 Nomor Pokok : 1862202052
 Program Studi : Akutansi Syariah
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Barang Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 24 November 2022 s/d 26 Desember 2022, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"PENERAPAN PSAK 23 TENTANG IMBALAN JASA KARYAWAN DI PUSKESMAS PALAKKA KABUPATEN BARRU (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)"

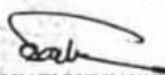
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara(i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
 Sub. Koordinator Pelayanan


SARMIATI BURHANUDDIN, SH, M.Pd
 Pangkat : Pembina, IV/a
 NIP. 19761112200502 2 002

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (Sebagai Laporan);
2. Kepala Bappelitbada Kab. Barru;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barru;
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peringgal.

SURAT SELESAI MENELITI



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PALAKKA

Jl. Pahlawan No.10 Kaerenge Desa Palakka Kecamatan Barru.90711
e-mail :pkmpalakka@yahoo.co.id



SURAT KETERANGAN

No.007/PKM-PLK/1/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPT Puskesmas Palakka Kecamatan Barru Kabupaten Barru memberikan keterangan bahwa :

Nama	: YUSRIANDI
NIM/Jurusan	: 1862202052/ Akuntansi Syariah
Instansi	: Mahasiswa(S1) IAIN Pare-Pare
Judul	: Penerapan PSAK 23 Tentang Imbalan Jasa Karyawan Di Puskesmas Palakka Kcamatan Barru (Analisis Akuntansi Syariah)

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang bersangkutan atas telah melaksanakan penelitian mulai tanggal 24 November 22 sd 26 Desember 2022 di Puskesmas Palakka dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai dengan judul yang tertera.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palakka, 20 Januari 2023

Kepala UPT Puskesmas Palakka



H. TAKBIR JAFAR, SKM S.Kep
Nip. 19751009-199803 1 003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. TAKBIR JAFAR . SKM . S . KEP
Agama : ISLAM
Alamat : BARRU
Pekerjaan : Kepala Puskesmas PALAKKA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara YUSRIANDI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Penerapan PSAK 23 Tentang Imbalan Jasa Karyawan Di Puskesmas Palakka Kab. Barru (Analisis Akuntansi Syariah)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 06 Desember 2022

Yang bersangkutan


H. TAKBIR JAFAR . SKM . S . KEP

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *ANDI HALIFAH, S-FARM*
Agama : ISLAM
Alamat : PALAKKA
Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **YUSRIANDI** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Penerapan PSAK 23 Tentang Imbalan Jasa Karyawan Di Puskesmas Palakka Kab. Barru (Analisis Akuntansi Syariah)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 06 Desember 2022

Yang bersangkutan

ANDI HALIFAH
.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

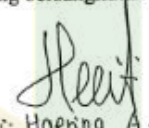
Nama : Hj Haenna, A. Md. Ak
Agama : Islam
Alamat : Jl. poros Makassar- pare, kel. Bonto 3, kec. Marang
Pekerjaan : Bendahara JKM UPT Puskesmas Palakka

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara YUSRIANDI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Penerapan PSAK 23 Tentang Imbalan Jasa Karyawan Di Puskesmas Palakka Kab. Barru (Analisis Akuntansi Syariah)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 06 Desember 2022

Yang bersangkutan


(Hj. Haenna, A. Md. Ak)


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. SUHARMAWATI .S.ST
Agama : ISLAM
Alamat : DATULAPPA
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara YUSRIANDI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Penerapan PSAK 23 Tentang Imbalan Jasa Karyawan Di Puskesmas Palakka Kab. Barru (Analisis Akuntansi Syariah)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 06 Desember 2022

Yang bersangkutan


HJ. SUHARMAWATI .S.ST



DOKUMENTASI WAWANCARA



GAMBAR 1 : Wawancara Dengan kepala Puskesmas Palakka



GAMBAR 2 : Wawancara Dengan Bendahara Kapitasi dan Non kapitasi



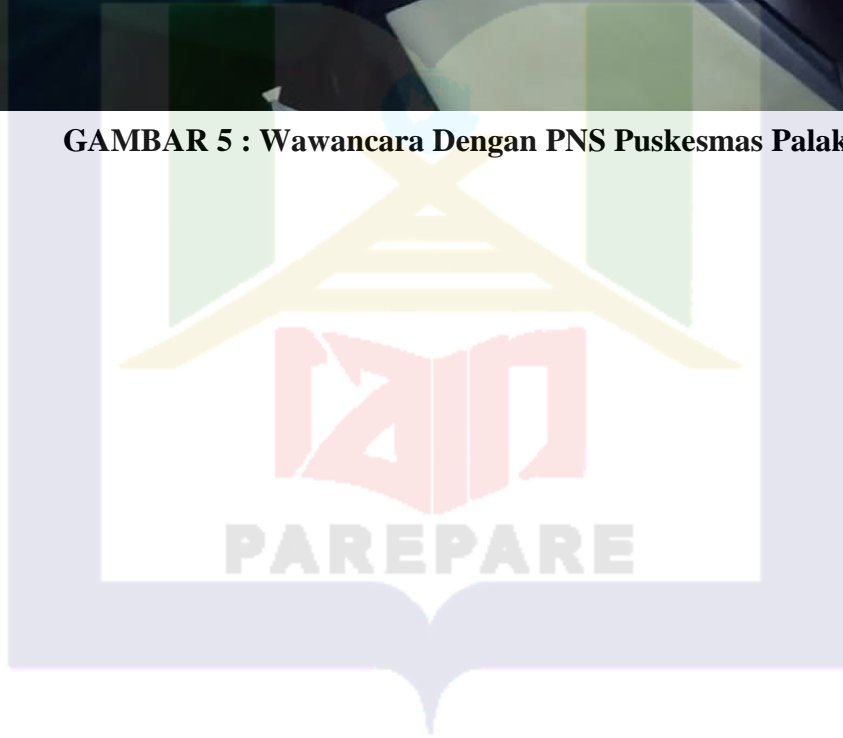
GAMBAR 3 : Wawancara Dengan PNS Puskesmas Palakka



GAMBAR 4: Wawancara Dengan Bendahara PAD



GAMBAR 5 : Wawancara Dengan PNS Puskesmas Palakka



MEKANISME PEMBAGIAN IMBALAN JASA SESUAI DENGAN GOLONGAN, JABATAN, DAN PENDIDIKAN

**MEKANISME PEMBAGIAN IMBALAN JASA SESUAI DENGAN
GOLONGAN, JABATAN, DAN PENDIDIKAN**
(Sumber data dari Puskesmas Palakka Kabupaten Barru)

NO	NAMA	JMLH YG DI TERIMA NOV	PPH 21	YG DIBAYARKAN
1	H. TAKBIR JAFAR SKM S. Kep	Rp 2,608,997	Rp 391,350	Rp 2,217,647
2	HJ.SUHARMAWATI.S.ST	Rp 2,021,973	Rp 101,099	Rp 1,920,874
3	HJ.HASBIANA, S.ST	Rp 1,369,723	Rp 205,458	Rp 1,164,265
4	H.M.IRWAN.S.KEP.NS.M.KES	Rp 1,630,623	Rp 244,593	Rp 1,386,030
5	ANDI NURAENI,S.KEP.Ns	Rp 1,379,758	Rp 68,988	Rp 1,310,770
6	LUSMA,S.KEP Ns	Rp 1,630,623	Rp 81,531	Rp 1,549,092
7	ASRIANY. S.Tr.Keb	Rp 903,114	Rp 45,156	Rp 857,959
8	Muhayyir Abbas AMd.Farm	Rp 847,924	Rp -	Rp 847,924
9	Hj. MURLIA,S.KEP NS	Rp 1,379,758	Rp 68,988	Rp 1,310,770
10	SUBAEDA,AMK	Rp 913,149	Rp 45,657	Rp 867,491
11	AMIRUDDIN,AMKG	Rp 1,043,599	Rp 52,180	Rp 991,419
12	ANDI HALIFAH.S.Farm	Rp 1,174,049	Rp 58,702	Rp 1,115,346
13	IKA DAULIKA A.Md.Keb	Rp 847,924	Rp -	Rp 847,924
14	HJ.DARMAWATI, AMd.KEB	Rp 978,374	Rp 48,919	Rp 929,455
15	ST.ROMA AMd.KEB	Rp 913,149	Rp 45,657	Rp 867,491
16	MAHUSENG AMd Kep	Rp 1,108,824	Rp 55,441	Rp 1,053,382
17	HJ.NURJANNAH,SKM.M,Kes	Rp 1,174,049	Rp 58,702	Rp 1,115,346

18	ARMIN ARIF R,SKM	Rp 948,270	Rp 47,413	Rp 900,856
19	ULFY DWI TALMI,SKM M.Adm Kes	Rp 702,422	Rp 35,121	Rp 667,301
20	Hj. HAERINA A.Md.AK	Rp 1,384,775	Rp -	Rp 1,384,775
21	MARIALAM, S.Kep	Rp 1,239,273	Rp 61,964	Rp 1,177,310
22	SURNIAH, SKM	Rp 1,108,824	Rp 55,441	Rp 1,053,382
23	YAYU SRIANTI A.Md.Keb	Rp 847,924	Rp -	Rp 847,924
24	HASMINI S.Tr.Keb	Rp 1,108,824	Rp 55,441	Rp 1,053,382
25	SUNARTI S.Kep Ns	Rp 1,369,723	Rp 68,486	Rp 1,301,237
26	Dr. KHAERUNNISA	Rp 1,944,204	Rp -	Rp 1,944,204
27	Dr. REZKI PURWASARI	Rp 2,021,973	Rp 101,099	Rp 1,920,874
	TOTAL	Rp 34,601,820	Rp 1,997,388	Rp 32,604,432



MEKANISME PEMBAGIAN IMBALAN JASA PAD

MEKANISME PEMBAGIAN IMBALAN JASA PAD

(Sumber data dari Puskesmas Palakka Kabupaten Barru)

NO	NAMA	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TOTAL
1	MEDIS 20 %	Rp 117,000	Rp 289,000	Rp 406,000
2	PARAMEDIS 53 %	Rp 310,050	Rp 765,850	Rp 1,075,900
3	NON PARAMEDIS 5%	Rp 29,250	Rp 72,250	Rp 101,500
4	MANAJEMEN 22 %	Rp 128,700	Rp 317,900	Rp 446,600
	JUMLAH	Rp 585,000	Rp 1,445,000	Rp 2,030,000

PAREPARE

MEKANISME PENGHITUNGAN PADA JASA KAPITASI

MEKANISME PENGHITUNGA PADA JASA KAPITASI

(Sumber data dari Puskesmas Palakka Kabupaten Barru)

NO	NAMA	JABATAN PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH YANG DITERIMA
1	2	3	4	5
1	IRMA SURIANI MARALA, AMK	D3 KEPERAWATAN	MAGANG	Rp 81,410
2	Ns, SALMIDA SADIK, S. Kep	S1 KEPERAWATAN NERS	MAGANG	Rp 126,638
3	MULIANI, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	MAGANG	Rp 153,775
4	MASTANG, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	MAGANG	Rp 171,866
5	MASNAENI, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	MAGANG	Rp 9,046
6	Hj. AMALIA ZAINUDDIN, SKM	S1 KESMAS (PROMKES)	MAGANG	Rp 54,274
7	NUR ASMAYANI, Amd.Kep	D3 KEPERAWATAN	MAGANG	Rp -
8	FARIDA HIDAYATI, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	MAGANG	Rp 135,684
9	MIRDANAWATI, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	MAGANG	Rp 81,410
10	HAJRAH, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	MAGANG	Rp 135,684
11	HARIATI, S. Farm	S1 FARMASI	MAGANG	Rp 54,274
12	JUMIYATI SYAM, SKM	S1 KESMAS (PROMKES)	MAGANG	Rp 617,884

13	FARIDA, S. Farm	S1 FARMASI	MAGANG	Rp -
14	MEGA MUSTIKA, S.Kep, Ns	S1 KEPERAWATAN NERS	MAGANG	Rp 54,274
15	IRMAWATI, S.Kep, Ns	S1 KEPERAWATAN NERS	MAGANG	Rp 90,456
16	SRI MURTI PATMAYANTI, S.Kep, Ns	S1 KEPERAWATAN NERS	MAGANG	Rp -
17	NURAENI, S.Kep, Ns	D3 KEPERAWATAN	MAGANG	Rp 117,593
18	ENDANG ULFA, Amd. Keb	D3 KEBIDANAN	MAGANG	Rp -
19	MUSFIDA RAHAYU, Amd. Kep	D3 KEPERAWATAN	MAGANG	Rp -
20	HASNIAR, Amd. Kes	D3 KEPERAWAN GIGI	MAGANG	Rp 208,049
21	RATNA, S.Kep, Ns	S1 KEPERAWATAN NERS	MAGANG	Rp 180,912
22	SRI WAHYUNI ADAM, S.Kep, Ns	S1 KEPERAWATAN NERS	MAGANG	Rp 180,912
23	RATNAH, A,Md.Kep	D3 KEPERAWATAN	MAGANG	Rp 126,638
24	SAM SAM, AMK	D3 KEPERAWATAN	MAGANG	Rp -
25	EMMA RAMDHANI,S.ST	D4 KEBIDANAN	MAGANG	Rp 90,456
26	HASMAWATI,S.Kep.Ns	S1	MAGANG	Rp

		KEPERAWATAN NERS		36,182
27	NURLINDA A.Md.Keb	KEBIDANANA	MAGANG	Rp 180,912
28	JUSMAN	SMA/SOPIR	KONTRAK DAERAH	Rp 66,798
29	NERJA PRAJAYA	SMA/SOPIR	KONTRAK DAERAH	Rp 53,439
30	NURBUAH, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	KONTRAK DAERAH	Rp 44,532
31	SULFIANA TAMRIN, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	KONTRAK DAERAH	Rp 53,439
32	FITRIANI JAFAR, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	KONTRAK DAERAH	Rp 44,532
33	HASNIATI, Amd.Kep	D3 KEPERAWATAN	KONTRAK DAERAH	Rp 20,039
34	NURAFDALIA, Amd.Kep	D3 KEPERAWATAN	KONTRAK DAERAH	Rp 22,266
35	MULIANA L, Amd.Kep	D3 KEPERAWATAN	KONTRAK DAERAH	Rp 22,266
36	FITRI WAHDANIYAH, A. Md.KI	D3 KESLING	KONTRAK DAERAH	Rp 44,532
37	ASTRIYANI, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	KONTRAK DAERAH	Rp 40,079
38	NIRMAWATI, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	KONTRAK DAERAH	Rp 33,399
39	DAHRIAWATI, A. Md. Gz	D3 GIZI	KONTRAK DAERAH	Rp 44,532
40	DEWI KUMALASARI, SKM	S1 KESMAS KESKER	KONTRAK DAERAH	Rp 44,532
41	ASRI	SMA/SATFAM	KONTRAK DAERAH	Rp 53,439
42	ZULFIKAR SATTAR	SMA/SATFAM	KONTRAK	Rp

			DAERAH	53,439
43	EMI ASTUTI, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	KONTRAK DAERAH	Rp 24,493
44	AYU ASHARI, Amd.Keb	D3 KEBIDANAN	KONTRAK DAERAH	Rp 35,626
45	IRWANTO, SKM/ SHELA	OPERATOR	KONTRAK DAERAH	Rp 44,532
46	SUNARFIANA, SE	PENGELOLA KEUANGAN	KONTRAK DAERAH	Rp 2,227
47	AGUS EFENDY, SKM	EPIDEMIOLOGI	KONTRAK DAERAH	Rp 48,985
Jumlah				Rp 3,685,456

Barru, 20 januari 2023

mengetahui kepala Puskesmas
Palakka



Pakbir Jafar, SKM. S.Kep

Nip.19751009 199803 1 003

PAREPARE

MEKANISME PENGHITUNGAN NON KAPITASI

MEKANISME PENGHITUNGAN NON KAPITASI

(Sumber data dari Puskesmas Palakka Kabupaten Barru)

NO	Nama Petugas	Gol.	%	JUMLAH JASA PELAYANAN (Rp)	PPH 21 5%	JUMLAH JASA DITERIMA (Rp)
1	2	4	5	6	7	8
MEDIS			30			
1	dr. Resky Purwasari	III	15	Rp 1,328,269.50	Rp 66,413.48	Rp 1,261,856.03
2	dr. Khaerunnisa		15	Rp 1,328,269.50		Rp 1,328,269.50
PARAMEDIS			55			
1	Lusma, S.Kep. Ns	III	11	Rp 974,064.30	Rp 48,703.22	Rp 925,361.09
2	Andi Nuraeni, S.Kep. Ns	III	11	Rp 974,064.30	Rp 48,703.22	Rp 925,361.09
3	Subaedah, AMK	III	11	Rp 974,064.30	Rp 48,703.22	Rp 925,361.09
4	Hj. Murlia, S.Kep.Ns	III	11	Rp 974,064.30	Rp 48,703.22	Rp 925,361.09
5	Marialam, S.Kep.Ns	III	11	Rp 974,064.30	Rp 48,703.22	Rp 925,361.09
MANAJEMEN			15			
1	H. Takbir Jafar, SKM.S.Kep (Kepala Puskesmas)	IV	8	Rp 708,410.40	Rp 106,261.56	Rp 602,148.84

Profi Puskesmas Palakka

A. Pendahuluan

Puskesmas palakka merupakan pusat pembangunan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat, dan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha pokok kesehatan.

Secara garis besar Puskesmas mempunyai 3 fungsi pokok:

1. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya.
2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat.
3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerjanya.

Sejak diberlakukannya desentralisasi beberapa peraturan perundang-undangan bidang kesehatan telah dan terus di susun. Peraturan perundangan kesehatan tersebut antara lain : (a) Keputusan menteri kesehatan Republik indonesia Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 Tentang kebijakan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010, (b) Keputusan Menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor 1202/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Indikator indonesia sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten sehat, (c) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 Tentang standard Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten /Kota.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut di perlukan indikator, antara lain Indikator indonesia sehat dan Indikator Kinerja dari Standard Pelayanan minimal bidang Kesehatan . Indikator Indonesia sehat yang di tetapkan dalam keputusan Menteri kesehatan tersebut di atas dapat di golonhkan ke dalam : (1) Indikator Derajat Kesehatan sebagai Hasil Akhir, Yang terdiri atas indikator – indikator untuk Moralitas, Morbiditas dan Status Gizi, (2) Indikator Hasil Antara ,

yang terdiri atas indikator-indikator untuk keadaan lingkungan, Perilaku Hidup, Akses dan Mutu pelayanan Kesehatan , Sumber Daya Kesehatan, Manajemen Kesehatan , Dan Kontribusi Sektor Terkait. Sedangkan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal kesehatan di kabupaten/ kota terdiri dari atas 38 Indikator kinerja dari 26 jenis pelayanan bidang Kesehatan Yang di selenggarakan oleh kabupaten/ Kota, serta indikator kinerja Lainnya yang pelayanannya ada pada kabupaten/kota tertentu.

Sistem Pencatatan dan Pelaporan (SP2TP), kinerja Puskesmas Secara Potensial dapat menunjang proses manajemen puskesmas. Namun berbagai data yang terbatas di puskesmas tidak memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan data secara optimal.

Profil puskesmas palakka yang diterbitkan secara berkala setahun sekali bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi sesuai dan kondisi kesehatan masyarakat secara umum disekitar wilayah kerja puskesmas palakka.

Profil kesehatan ini menyajikan tentang :

- 1) Keadaan umum dan lingkungan yang memuat informasi tentang keadaan umum dan lingkungan sekitar wilayah kerja puskesmas palakka, struktur kependudukan, pertumbuhan sosial ekonomi serta situasi lingkungan fisik dan biologik yang diperkirakan terkait erat dengan kesehatan.
- 2) Situasi derajat kesehatan yang memuat informasi tentang angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan angka kesakitan dalam masyarakat dalam setahun terakhir.
- 3) Upaya pelayanan kesehatan yang menyajikan data tentang pencapaian upaya – upaya pelayanan kesehatan di puskesmas.
- 4) Sumber daya kesehatan yang menampilkan data tenaga kesehatan, sarana kesehatan, dana baik yang bersumber perolehan dan besarnya anggaran.

- 5) Penyajian data umum dan data kesehatan dalam tabel yang ditempatkan pada lampiran sebagai daftar tabel .

Dengan demikian sangat jelas bahwa tujuan diterbitkannya profil puskesmas 2022 ini adalah dalam rangka menyediakan sarana untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan kesehatan tahun 2022 dengan mengacu kepada visi indonesia sehat 2025. Oleh karena itu, gambaran yang disajikan dalam profil puskesmas palakka tahun 2022 ini disusun secara sistematis mengikuti pengertian dari visi indonesia sehat 2025. Adapun sistematika penyajian profil puskesmas palakka 2022 ini adalah dalam bentuk narasi, tabel dan gambar.

Dalam mewujudkan fungsi tersebut Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dalam bentuk kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kegiatan tersebut terus dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan puskesmas. Sebagai tolok ukur pencapaian kegiatannya, puskesmas mengacu kepada standar/indikator yang ada seperti SPM (*Standar Pelayanan Minimal*), IIS (*Indikator Indonesia Sehat*), maupun MDGs (*Millenium Development Goals*).

B. Keadaan Wilayah (Geografi)

Luas wilayah kabupaten Barru adalah 1.174,72 km yang secara topografi terdiri dari pegunungan, pantai dan lembah/daratan, sehingga mata pencarian penduduk juga bervariasi sesuai kondisi alam tersebut. Secara administratif pemerintah di bagi menjadi 7 kecamatan, 54 Desa/Kelurahan, dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian yang di dukung oleh lahan sawah seluas 13.214,30 Ha dan lahan kering seluas 104.257,70 Ha. Kabupaten Barru terletak di sebelah utara ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan berjarak 102 Km dari Kota Makassar . Kabupaten Barru terletak di antara Koordinat $40^{\circ} 5'' 49'$ - $40^{\circ} 47'' 35'$ Lintang Selatan $119^{\circ} 35'' 16'$ Bujur Timur, Dengan berbatasan dengan daerah lainnya seperti :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pare-pare
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Sedangkan Wilayah Kerja Puskesmas Palakka meliputi 4 Desa Yaitu : Desa Palakka, Tompo, Galung, Dan Desa Anabanua, Dengan Luas Wilayah kerjanya 119,71 Ha. Wilayah Kerja yang di maksud meliputi :

Tabel 1.

Data Geografis Puskesmas Palakka Tahun 2022

Variabel Geografis	Data
Luas Wilayah	119.71 Km ²
Jumlah Kelurahan/Desa	4
Jumlah Lingkungan/Dusun	26
Jumlah Posyandu	19
Jumlah Musim	2 (kemarau,hujan)
Curah hujan	100 mm/bulan
Jumlah hari hujan	113 hari
Suhu	22 ^o - 34 ^o
Kelembaban rata-rata	Tinggi
Jenis Tanah	Kapur & tanah Liat/tanah merah
Ketinggian	100-500 mdpl
Luas Lahan Sawah	Ha
Luas Lahan Kering	5.941,2 Ha
Jarak ke ibu kota kecamatan	13.5 km, akses mudah
Jarak ke ibu kota kabupaten	13.5km, akses mudah
Jarak ke ibu kota propinsi	115 km, akses cukup mudah
Jarak ke Dinas kesehatan Kabupaten	13 km, akses mudah
Jarak ke RSUD Barru	15 km, akses mudah
Jarak ke Koramil*	13 km, akses mudah
Jarak ke Polsek*	13.5 km, akses mudah

Sumber Data: BPS Kabupaten Barru

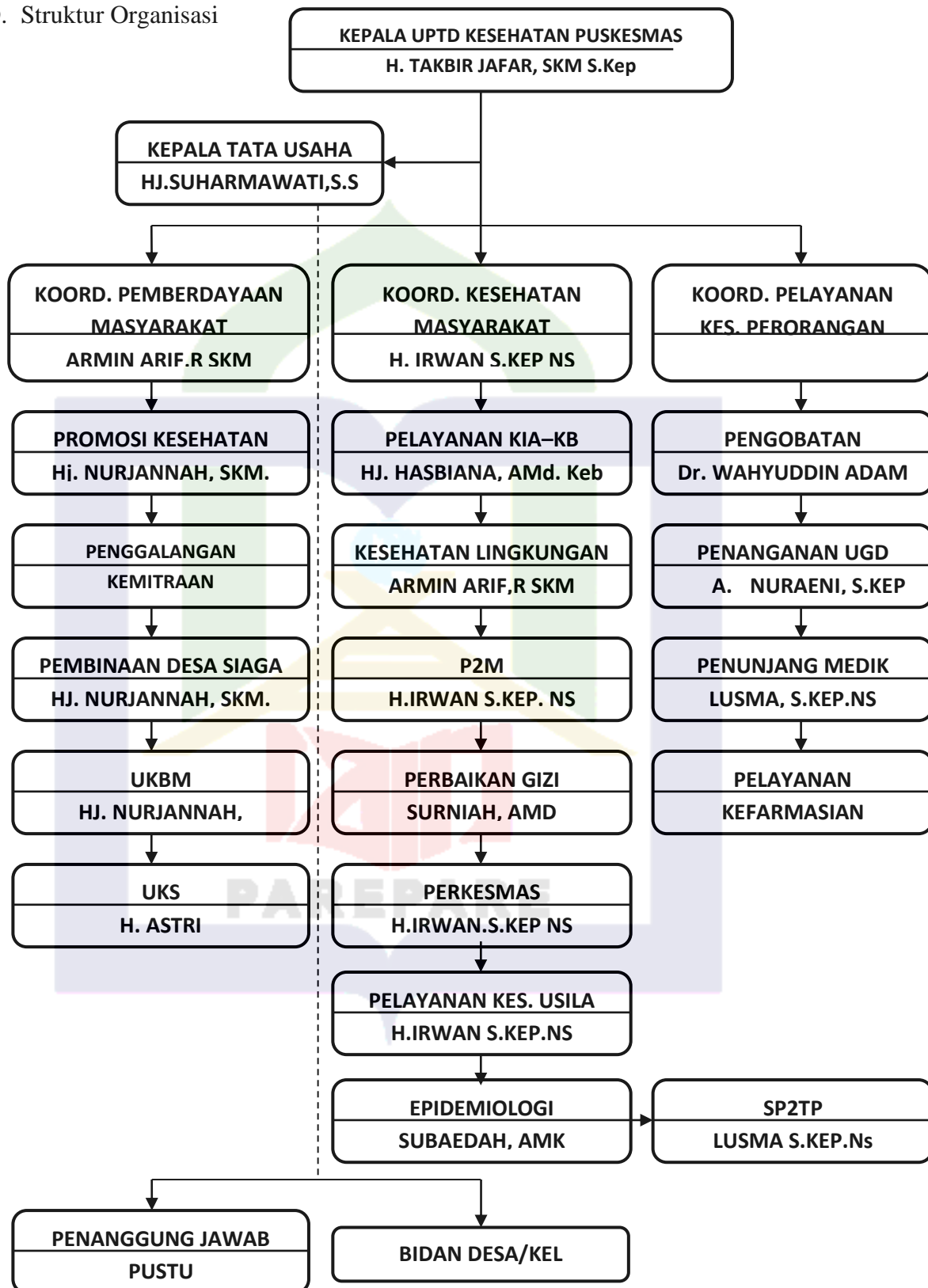
C. Sumber Daya Manusia

Tabel 3.
SDM Puskesmas Palakka Tahun 2022

No	Jenis SDM	Jumlah yang Ada			Analisa Kebutuhan	Keterangan
		PNS CPNS	PTT Kontrak	Magang		
1	Kepala Puskesmas	1			Terpenuhi	
2	Kasub. TU	1			Terpenuhi	
3	Dokter umum	2	1		Terpenuhi	
4	Dokter Gigi	-	-		Terpenuhi	
5	Sarjana Kesehatan Masyarakat	2	1	2	Terpenuhi	
6	Sanitarian	1	1		Terpenuhi	
7	Petugas Gizi	2	1	1	Terpenuhi	
8	Bidan	8	3	11	Terpenuhi	
9	Perawat Umum	7	3	11	Terpenuhi	
10	Perawat Gigi	1		1	Terpenuhi	
11	Asisten Apoteker	2		2	Kurang	Apoteker
12	Analisis Kesehatan	1			Kurang	
14	Driver	-	2	-	Terpenuhi	
15	Tenaga Lain	1	16	1	Terpenuhi	
	Jumlah	28	29	29		

Sumber Data: Kepegawaian Puskesmas P

D. Struktur Organisasi



PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) No. 23 PENDAPATAN

TUJUAN

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 tentang Pendapatan disetujui dalam Rapat Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 7 September 1994. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material.

Penghasilan didefinisikan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti dan sewa. Tujuan Pernyataan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu.

Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal. Pernyataan ini mengidentifikasi keadaan yang memenuhi kriteria tersebut agar pendapatan dapat diakui. Pernyataan ini juga memberikan pedoman praktis dalam penerapan kriteria tersebut.

RUANG LINGKUP

01. Pernyataan ini harus diterapkan dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut ini:

- (a) penjualan barang
- (b) penjualan jasa
- (c) penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen.

02. Barang meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dibeli untuk dijual kembali.

03. Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu periode atau selama lebih dari satu periode. Beberapa kontrak penjualan jasa yang timbul dari kontrak konstruksi, misalnya, kontrak penjualan jasa mengenai manajer proyek dan arsitek, tidak dibahas dalam Pernyataan ini.

04. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk:

- (a) bunga - pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah t t terhutang kepada perusahaan.
- (b) royalti - pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan, misalnya, paten, merek dagang, hak cipta, dan perangkat lunak komputer.
- (c) dividen - distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

05. Pendapatan berikut ini telah atau akan diatur dalam standar akuntansi keuangan tersendiri sehingga tidak dibahas dalam Pernyataan ini:

- (a) perjanjian sewa guna usaha (diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 30 tentang Akuntansi Sewa Guna Usaha).
- (b) dividen yang timbul dari investasi yang dipertanggungjawabkan menurut metode ekuitas (diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 13 tentang Akuntansi Untuk Investasi).
- (c) kontrak asuransi dari perusahaan asuransi (untuk jenis asuransi kerugian, diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 28 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian).
- (d) perubahan dalam nilai wajar dari aktiva dan kewajiban finansial atau pelepasannya.
- (e) perubahan dalam nilai aktiva lancar lain.
- (f) pertumbuhan alami dari ternak dan hasil pertanian.
- (g) hasil hutan (diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 32 tentang Akuntansi Perusahaan Hutan).

(h) ekstraksi hasil tambang (diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum).

DEFINISI

06. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini: Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Nilai wajar adalah suatu jumlah, untuk itu suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*). **07** Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan karena itu harus dikeluarkan dari pendapatan. Begitupun dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto manfaat ekonomi termasuk jumlah yang ditagih atas nama prinsipal, tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas perusahaan, dan karena itu bukan merupakan pendapatan. Yang merupakan pendapatan hanyalah komisi yang diterima dari prinsipal.

PENGUKURAN PENDAPATAN

08. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

09. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan.

10. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun, bila arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau yang dapat diterima. Misalnya, suatu perusahaan dapat memberikan kredit bebas bunga kepada pembeli atau menerima wesel tagih dari pembeli dengan tingkat bunga

di bawah pasar sebagai imbalan dari penjualan barang. Bila perjanjian tersebut secara efektif merupakan suatu transaksi finansial, nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan suatu tingkat bunga tersirat (imputed). Tingkat bunga tersirat tersebut adalah yang paling mudah ditentukan dari:

- (a) tingkat bunga yang berlaku bagi instrumen yang serupa dari suatu penerbit (issuer) dengan penilaian kredit (credit rating) yang sama.
- (b) suatu tingkat bunga untuk mengurangi (discount) nilai nominal instrumen tersebut ke harga jual tunai pada saat ini dari barang atau jasa. Perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal dari imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga sebagaimana dijelaskan paragraf 28 dan 29 .

11. Bila barang atau jasa dipertukarkan (barter) untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai suatu transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Hal ini sering terjadi dengan komoditi seperti minyak atau susu di mana penyalur menukarkan (swap) persediaan di berbagai lokasi untuk memenuhi permintaan dengan suatu dasar tepat waktu dalam suatu lokasi tertentu. Bila barang dijual atau jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang dan jasa yang tidak serupa, pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer.

12. Kriteria pengakuan dalam Pernyataan ini biasanya diterapkan secara terpisah kepada setiap transaksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kriteria pengakuan tersebut kepada komponen-komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari suatu transaksi tunggal supaya mencerminkan substansi dari transaksi tersebut. Misalnya, bila harga penjualan dari suatu produk termasuk jumlah yang dapat diidentifikasi untuk jasa purna jual, jumlah tersebut ditanggihkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode di mana jasa tersebut dilakukan. Sebaliknya, kriteria pengakuan diterapkan pada dua atau lebih transaksi bersama-sama bila transaksi-transaksi tersebut terikat sedemikian rupa sehingga pengaruh komersialnya tidak dapat dimengerti tanpa melihat kepada rangkaian transaksi tersebut secara keseluruhan. Misalnya, suatu perusahaan dapat menjual barang dan, pada saat yang sama, menyetujui perjanjian yang terpisah untuk membeli kembali barang tersebut di kemudian hari, sehingga meniadakan pengaruh yang

sesungguhnya dari transaksi tersebut; dalam hal ini, kedua transaksi tersebut diperlakukan bersamaan.

PENJUALAN BARANG

13. Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- (a) perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.
- (b) perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
- (c) jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.
- (d) besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut
- (e) biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal .

14. Penentuan kapan suatu perusahaan telah memindahkan risiko signifikan dan manfaat kepemilikan kepada pembeli memerlukan pengujian keadaan transaksi tersebut. Pada umumnya, pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan bersamaan waktunya dengan pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli. Hal ini terjadi pada kebanyakan penjualan eceran. Dalam hal lain, pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan terjadi pada saat yang berbeda dengan pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut.

15. Jika perusahaan tersebut menahan risiko signifikan dari kepemilikan, transaksi tersebut bukanlah suatu penjualan dan pendapatan tidak diakui. Suatu perusahaan dapat menahan risiko kepemilikan yang signifikan dengan berbagai cara. Misalnya:

- (a) bila perusahaan menahan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan suatu hal yang tidak memuaskan yang tidak dijamin sebagaimana lazimnya
- (b) bila penerimaan pendapatan dari suatu penjualan tertentu tergantung pada pendapatan pembeli yang bersumber dari penjualan barang yang bersangkutan

(c) bila pengiriman barang tergantung pada instalasinya, dan instalasi tersebut merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan oleh perusahaan

(d) bila pembeli berhak untuk membatalkan pembelian berdasarkan alasan yang ditentukan dalam kontrak dan perusahaan tidak dapat memastikan apakah akan terjadi retur.

16. Jika perusahaan hanya menahan risiko tidak signifikan atas kepemilikan, transaksi tersebut adalah suatu penjualan dan pendapatan diakui. Misalnya, penjual mungkin menahan hak milik atas barang semata-mata untuk melindungi kolektibilitas dari jumlah yang jatuh tempo. Dalam hal seperti itu, jika perusahaan telah memindahkan manfaat kepemilikan dan risiko yang signifikan transaksi tersebut adalah suatu penjualan dan pendapatan harus diakui. Contoh lain perusahaan yang hanya menahan risiko yang tidak signifikan dari kepemilikan adalah dalam penjualan eceran dengan syarat dapat dikembalikan bila pelanggan tidak puas. Pendapatan dalam hal ini diakui pada waktu penjualan dilakukan jika penjual dapat mengestimasi secara andal retur yang akan terjadi dan mengakui suatu kewajiban untuk retur berdasarkan pengalaman sebelumnya dan faktor-faktor lain yang relevan.

17. Pendapatan diakui hanya bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada perusahaan. Kadang-kadang, kemungkinan hal tersebut terjadi sangat kecil, sampai imbalan diterima atau sampai suatu ketidakpastian dihilangkan. Misalnya, belum ada kepastian bahwa pemerintahan asing akan memberi ijin untuk pengiriman imbalan untuk suatu penjualan di suatu negara asing. Bila ijin diberikan, ketidakpastian tersebut dihilangkan dan pendapatan diakui. Namun, bila suatu ketidakpastian timbul tentang kolektibilitas sejumlah tertentu yang telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak tertagih atau jumlah yang pemulihannya tidak lagi besar kemungkinannya, diakui sebagai beban, menggantikan penyesuaian jumlah pendapatan yang diakui semula.

18. Pendapatan dan beban sehubungan dengan suatu transaksi atau peristiwa tertentu diakui secara bersamaan; proses ini biasanya mengacu pada pengaitan pendapatan dengan beban (*matching revenue and expose*). Beban, termasuk jaminan dan biaya lain yang terjadi setelah pengiriman barang, biasanya dapat diukur dengan andal jika kondisi lain untuk pengakuan pendapatan yang berkaitan dapat dipenuhi. Tetapi, pendapatan tidak dapat diakui bila beban yang berkaitan tidak dapat diukur dengan

andal. Dalam keadaan demikian, setiap imbalan yang telah diterima untuk penjualan barang tersebut diakui sebagai suatu kewajiban.

PENJUALAN JASA

19. Bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

- (a) jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal
- (b) besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan
- (c) tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal
- (d) biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

20. Pengakuan pendapatan dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Menurut metode ini, pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa diberikan. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode.

21. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Namun, bila suatu ketidakpastian timbul mengenai kolektibilitas suatu jumlah yang telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak tertagih, atau jumlah yang pemulihannya (recovery) tidak lagi besar kemungkinannya, diakui sebagai suatu beban dari pada penyesuaian jumlah pendapatan yang diakui semula. PSAK No. 23 PENDAPATAN 9 of 14

22. Suatu perusahaan dapat membuat estimasi yang andal setelah perusahaan tersebut mencapai persetujuan mengenai hal-hal berikut dengan pihak lain dalam transaksi tersebut:

- (a) hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan kekuatan hukum berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak-pihak tersebut.

(b) imbalan yang harus dipertukarkan.

(c) cara dan persyaratan penyelesaian. Biasanya perusahaan perlu mempunyai sistem anggaran dan pelaporan keuangan intern yang efektif. Perusahaan tersebut menelaah dan bila perlu merevisi estimasi pendapatan sewaktu jasa diberikan. Kebutuhan revisi tersebut tidak perlu mengindikasikan bahwa hasil transaksi tersebut tidak dapat diestimasi dengan andal.

23. Tingkat penyelesaian suatu transaksi dapat ditentukan dengan berbagai metode. Suatu perusahaan menggunakan metode yang dapat mengukur dengan andal jasa yang diberikan. Tergantung pada sifat transaksi, metode tersebut dapat meliputi:

(a) survei pekerjaan yang telah dilaksanakan

(b) jasa yang dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai persentase dari total jasa yang harus dilakukan

(c) proporsi biaya yang terjadi hingga tanggal tertentu dibagi estimasi total biaya transaksi tersebut. Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang dilaksanakan hingga tanggal tertentu dimasukkan dalam biaya yang terjadi hingga tanggal tersebut. Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang dilakukan, atau yang harus dilakukan dimasukkan kedalam estimasi total biaya transaksi tersebut.

Pembayaran berkala dan uang muka yang diterima dari pelanggan sering tidak mencerminkan jasa yang dilakukan.

24. Untuk tujuan praktis, bila jasa dihasilkan oleh sejumlah kegiatan yang tidak dapat ditentukan selama suatu periode tertentu, pendapatan diakui atas dasar garis lurus selama periode tertentu kecuali jika ada bukti bahwa ada metode lain yang lebih baik yang dapat mencerminkan tingkat penyelesaian. Bila kegiatan tertentu jauh lebih signifikan daripada kegiatan yang lain, pengakuan pendapatan ditunda sampai kegiatan yang signifikan tersebut dilakukan.

25. Bila hasil transaksi yang meliputi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui hanya yang berkaitan dengan beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali.

26. Selama tahap awal suatu transaksi, seringkali terjadi bahwa hasil transaksi tersebut tidak dapat diestimasi dengan andal. Namun demikian, besar kemungkinan

terjadi bahwa perusahaan tersebut akan memperoleh kembali biaya transaksi yang terjadi. Oleh karena itu, pendapatan yang diakui hanya yang berkaitan dengan biaya yang telah terjadi yang diharapkan dapat diperoleh kembali. Karena hasil transaksi tersebut tidak dapat diestimasi dengan andal, tidak ada laba yang diakui.

27. Jika hasil dari suatu transaksi tidak dapat diestimasi dengan andal dan kecil kemungkinan biaya yang terjadi akan diperoleh kembali, pendapatan tidak diakui dan biaya yang terjadi diakui sebagai beban. Bila kondisi yang semula mengakibatkan estimasi hasil kontrak tidak dapat dilakukan dengan andal tidak lagi ada, pendapatan diakui sesuai dengan paragraf 19, menggantikan paragraf 25.

BUNGA, ROYALTI DAN DEVIDEN

28. Pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihakpihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen harus diakui atas dasar yang dijelaskan dalam paragraf 29 bila:

- (a) besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan
- (b) jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.

29. Pendapatan harus diakui dengan dasar sebagai berikut:

- (a) bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut
- (b) royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan
- (c) dalam metode biaya (cost method), dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

30. Hasil efektif suatu aktiva merupakan tingkat yang diperlukan untuk mendiskontokan aliran penerimaan kas dimasa depan yang diharapkan selama hidup aktiva tersebut untuk menyamakan jumlah tercatat semula dari aktiva tersebut. Pendapatan bunga mencakup jumlah amortisasi setiap diskon, premium atau perbedaan lain antara jumlah tercatat semula dari suatu instrumen hutang dan jumlahnya pada saat jatuh tempo.

31. Jika bunga yang belum dibayar telah diakru sebelum pembelian suatu investasi (investment) yang berbunga, penerimaan bunga kemudian dialokasikan antara periode sebelum dan sesudah; hanya bagian setelah pembelian yang diakui sebagai

pendapatan. Jika dividen pada sekuritas ekuitas diumumkan dari penghasilan neto sebelum pembelian, dividen tersebut dikurangi dari harga beli sekuritas tersebut. Jika sulit untuk membuat alokasi seperti itu kecuali atas dasar arbiter, dividen diakui sebagai pendapatan kecuali bila dividen itu dengan jelas merupakan suatu perolehan kembali dari sebagian harga beli sekuritas ekuitas tersebut.

32. Royalti diakui sesuai dengan syarat perjanjian yang relevan kecuali, dengan memperhatikan hakikat perjanjian, adalah lebih sesuai untuk mengakui pendapatan atas suatu dasar yang sistematis dan rasional lain.

33. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan tersebut. Namun, bila ketidakpastian timbul tentang kolektibilitas sejumlah yang telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak dapat ditagih, atau jumlah yang pemulihannya tidak lagi besar kemungkinannya, diakui sebagai beban, daripada penyesuaian jumlah pendapatan yang diakui semula.

PENGUNGKAPAN

34. Perusahaan harus mengungkapkan:

- (a) kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa.
- (b) jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan dari penjualan jasa, penjualan barang, bunga, royalti dan deviden.
- (c) jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa dimasukkan dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan.
- (d) pendapatan yang ditunda pengakuannya.

35. Suatu perusahaan mengungkapkan setiap keuntungan dan kerugian kontinjen sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.8 tentang Kontinjensi dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca. Keuntungan dan kerugian kontinjen dapat timbul dari pos-pos seperti biaya jaminan, klaim, denda, atau kemungkinan kerugian lainnya.

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PERNYATAAN NO. 23 PENDAPATAN .

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Pernyataan No. 23 terdiri dari paragraf 36 - 44. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks paragraf 1-35.

36. Pernyataan ini harus diterapkan dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi terdiri dari penjualan barang, penjualan jasa dan penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga royalti dan dividen.

PENGUKURAN PENDAPATAN

37. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

PENJUALAN BARANG

38. Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- (a) perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli
- (b) perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual
- (c) jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal
- (d) besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut
- (e) biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

PENJUALAN JASA

39. Bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

- (a) jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.

(b) besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan.

(c) tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal.

(d) biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. 40 Bila hasil transaksi yang meliputi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui hanya yang berkaitan dengan beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali.

BUNGA, ROYATI DAN DEVIDEN

41. Pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihakpihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen harus diakui atas dasar yang diatur dalam paragraf 42 bila:

(a) besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan.

(b) jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.

42. Pendapatan harus diakui dengan dasar sebaqai berikut:

(a) bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut.

(b) royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan

(c) dalam metode biaya (cost method), dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

PENGUNGKAPAN

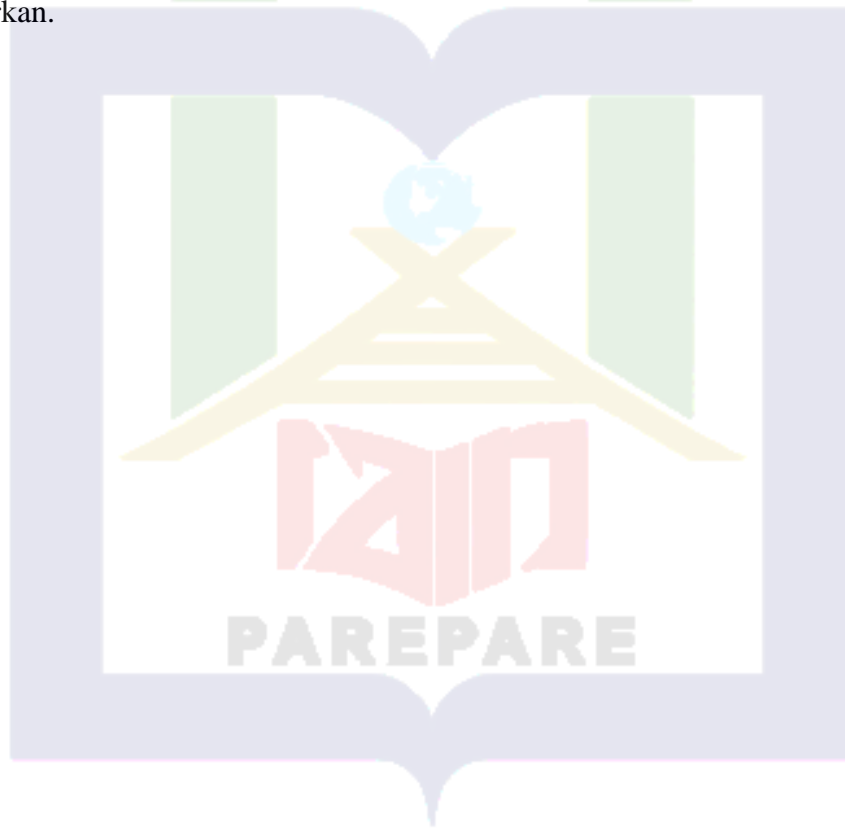
43. Perusahaan harus mengungkapkan:

(a) kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa.

- (b) jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan dari : penjualan barang, penjualan jasa, deviden, bunga dan royalti.
- (c) jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa dimasukkan dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan.
- (d) pendapatan yang ditunda pengakuannya.

TANGGAL EFEKTIF

44. Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan yang mencakupi periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995. Penerapan lebih dini dianjurkan.





BIODATA PENULIS

YUSRIANDI, Lahir di Barang 03 juni 1999, Merupakan anak ke-1 dari 2 bersaudara, semuanya laki-laki yang lahir dari pasangan Ayahanda Mastang dan Ibunda Heriawati. Saat ini penulis tinggal di Barang, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Penulis memulai pendidikan SD Negeri Barang dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 03 Barru lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan sekolah di SMK Negeri 1 Barru lulus pada tahun 2017. Setelah lulus, penulis kemudian melanjutkan studi kejenjang S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare tahun 2018 dan pada tahun inilah kampus yang ditempati penulis menimbah ilmu bergabti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Akuntansi Syariah (AKS) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama kuliah penulis bergabung di beberapa organisasi Ekstra kampus. Kemudian penulis melakukan Pengabdian Kuliah Masyarakat (KPM) di Kelurahan Buntu Sugi, kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, serta melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sidrap. Pada tahun 2023 akhirnya penulis berhasil menyusun dan menyelesaikan Skripsi dengan judul ***“Penerapan PSAK No. 23 tentang Imbalan Jasa Karyawan di Puskesmas Palakka kabupaten Barru (Analisis Akuntansi Syariah)”***.